



# WiRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## KONFLIK INFORMASI, KEAMANAN NASIONAL & BELA NEGARA



PUSREHAB KEMHAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN PRODUKTIVITAS PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

PERAN PUSAT KONSTRUKSI BARANAHAN KEMHAN DALAM RANGKA PENGUATAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA MELALUI SARANA DAN PRASARANA PERTAHANAN TNI

MENGINGAT KEMBALI "ILMU DAN AMAL, GEEST-WIL-DAAD"



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

kemhan



Kemhan\_RI



kemhanri

ISBN 1693-0231



INDONESIA



## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Marsdyo TNI Hadiyan Sumintaatmadja

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Redaksi:

M. Adi Wibowo , S.Sos, M.Si.  
Lettu Cku Lindu Baliyanto

### Desain Grafis:

Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Distribusi :

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:

Puskom Publik Kemhan  
Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta  
Telp. 021-3829151



## Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA Edisi ketiga bulan Mei-Juni 2018. Tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan diantaranya Konflik Informasi, Keamanan Nasional dan Bela Negara; Pusrehab Kemhan sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian dan Produktifitas Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI; Peran Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan dalam Rangka Penguatan Pertahanan Negara Indonesia melalui Sarana dan Prasarana Pertahanan TNI; dan Mengingat Kembali “Ilmu dan Amal, Geest-Wil-Daad”; serta beberapa Berita Pertahanan.

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan *online* di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

# Daftar Isi

## ARTIKEL

6

### KONFLIK INFORMASI, KEAMANAN NASIONAL & BELA NEGARA

Sosial media memainkan peranan baru dalam politik, baik dalam skala nasional maupun internasional. Penggunaan sosial media oleh aktivis digital, telah banyak digunakan di beberapa negara di dunia seperti Brazil, China, Jerman, Polandia, Rusia, dan Indonesia.

14

### PUSREHAB KEMHAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN PRODUKTIFITAS PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahsakitan.

18

### PERAN PUSAT KONSTRUKSI BARAHAAN KEMHAN DALAM RANGKA PENGUATAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA MELALUI SARANA DAN PRASARANA PERTAHANAN TNI

Setiap negara mempunyai sistem pertahanan sendiri untuk mempertahankan teritorialnya baik itu daratan, lautan maupun udara. Dengan mempergunakan sistem pertahanan yang telah negara tersebut pilih, maka diharapkan dapat mempertahankan wilayah serta keadautan negaranya dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negeranya sendiri.

24

### MENGINGAT KEMBALI "ILMU DAN AMAL, GEEST-WIL-DAAD"

Jagat maya belum lama ini ramai dengan perbincangan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kini ada berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018.



## BERITA PERTAHANAN

28 MENHAN MENGHADIRI SPECIAL FORCE EXHIBITION AND CONFERENCE 2018 (SOFEX) DI YORDANIA

30 KASAL DAN SEKJEN KEMHAN MENYAMBUT KAPAL SELAM KRI ARDADEDALI-404

32 DELAPAN HELIKOPTER CANGGIH APACHE AH-64E RESMI PERKUAT TNI AD

34 MENHAN : KAPAL KRI TELUK LADA 521 MENJADI KEBANGGAAN TNI AL

35 ANGKATAN UDARA PHILIPINA TERIMA DUA UNIT PESAWAT NC 212I DARI PT DI



## KONFLIK INFORMASI, KEAMANAN NASIONAL & BELA NEGARA

Oleh:  
**Dharma Agung, M.Si (Han)**  
Alumni Universitas Pertahanan

Sosial media memainkan peranan baru dalam politik, baik dalam skala nasional maupun internasional. Penggunaan sosial media oleh aktivis digital, telah banyak digunakan di beberapa negara di dunia seperti Brazil, China, Jerman, Polandia, Rusia, dan Indonesia. Sosial media yang awalnya digunakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kini juga dimanfaatkan untuk melakukan protes-protes politik, pemberontakan, dan melahirkan sejumlah revolusi di berbagai negara di Timur Tengah yang dikenal dengan *Arab Spring*.

*"Whoever controls the media, controls the mind."*  
- Jim Morrison-

Tulisan ini akan mengulas peran sosial media terkait perang/konflik informasi, fenomena "Pembusukan Kebenaran" di era politik *Post-Truth*, dan solusi alternatif dalam gerakan literasi digital untuk menguatkan keamanan nasional dari sisi informasi atau dunia maya.

### Sosial Media Dan Perang/Konflik Informasi

Sosial media menjadi alat politik karena dianggap sebagai kanal media yang murah, dapat menjangkau publik yang lebih luas dan ditargetkan, serta tanpa hambatan

batas geografis. Penggunaan sosial media memungkinkan tidak hanya untuk mengkomunikasikan, berbagi atau menangkap informasi, menganalisis dinamika sosio-politik dan mengantisipasi tren ekonomi-keuangan, tetapi juga untuk menggambarkan kejadian, realitas model, mempengaruhi persepsi situasi tertentu, masalah spesifik atau orang, dan mempengaruhi pilihan dan perilaku.

Oleh karena itu, sosial media dapat sangat mempengaruhi pengambilan keputusan institusional, bisnis atau tim strategis, serta pembentukan dan

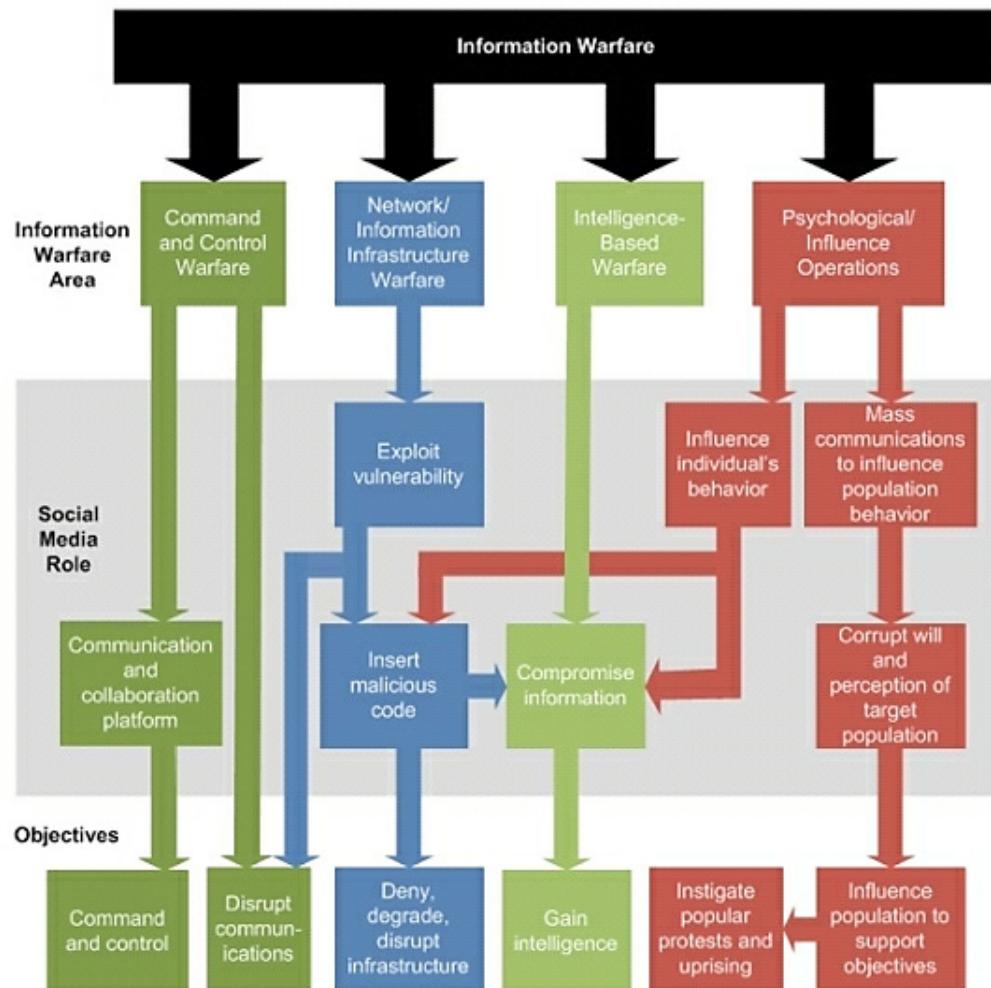
pengembangan kesadaran kolektif opini publik. Alat-alat ini dapat digunakan untuk mengganggu proses pengambilan keputusan lawan, baik secara langsung, yaitu memanipulasi kerangka informasi dan analisis mereka atau mempengaruhi kolaborator dekat mereka, dan secara tidak langsung: mempengaruhi kelompok orang (yaitu partai politik, serikat pekerja, opini publik, dll.) yang reaksinya mempengaruhi pilihan kepemimpinan suatu negara.

Aylin Manduric dalam tulisannya "Social Media as a Tool for Information Warfare" menyebutkan

sosial media sebagai senjata kata-kata yang mempengaruhi hati dan pikiran audiens yang ditargetkan, dan senjata pemusnah massal yang bisa berdampak pada target di dunia fisik. Aplikasi media sosial bisa menjadi alat untuk konflik saat mereka jatuh ke tangan yang salah.

Dalam konteks perang modern, sosial media juga dapat digunakan sebagai senjata dalam *Cyber Warfare*, *Information Conflict/Warfare*, *Hybrid Warfare* atau *Netwar*. Niekerk dan Maharaj menunjukkan bagaimana sosial media berperan dalam konflik informasi, seperti terlihat pada gambar 1.

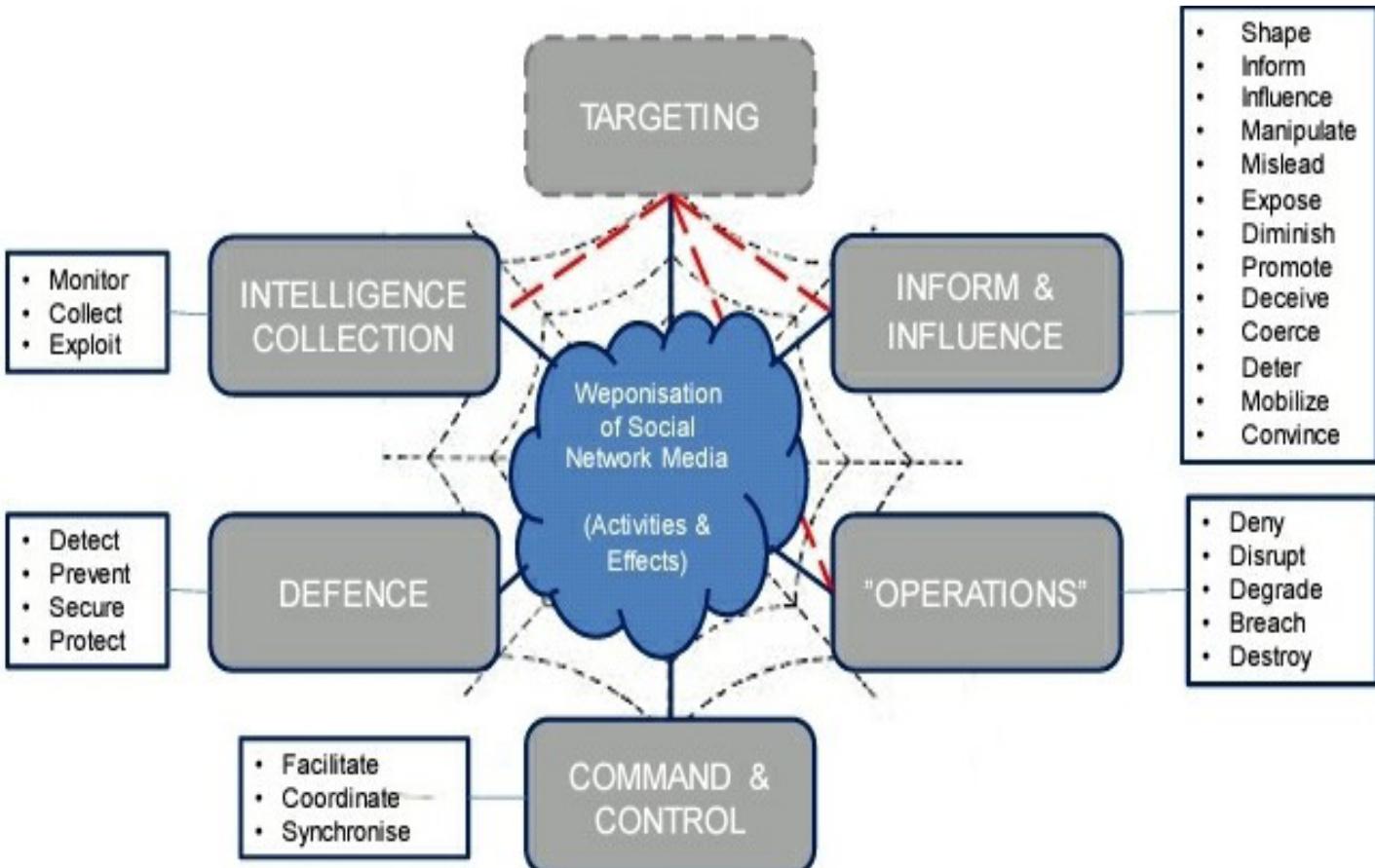
Gambar 1. Sosial Media Dalam Perang Informasi



Sumber: Brett Van Niekerk, Manoj Maharaj, *Social Media and Information Conflict*, International Journal of Communication 7, 2013, hal. 1175

Sedangkan Thomas Elkjer Nissen mengusulkan enam cara media sosial dapat digunakan untuk mendukung operasi militer, antara lain *Intelligence Collection, Targeting, Inform and Influence (Psychological Warfare), Cyber Operations, Defence, dan Command and Control.*

Gambar 2. Sosial Media Sebagai Senjata



Sumber: Nato Strategic Communications Centre Of Excellence, *Social Media As A Tool Of Hybrid Warfare*, 2016, hal. 11.

Tidak heran bila sebagian negara menganggap sosial media sebagai ancaman keamanan nasional, termasuk terhadap demokrasi, dan melakukan pemblokiran akses terhadap sejumlah layanan sosial media. Apakah dengan berbagai kejadian politik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sosial media memberikan ancaman bagi tatanan politik dan keamanan nasional?

Aday, Farrell, Lynch, Sides, dan

Freelon (2012) menyatakan tidak boleh menaksir terlalu tinggi peran media sosial dalam *Arab Spring* dan kejadian serupa, karena media tradisional juga memainkan peran penting. Demikian pula, upaya pemerintah untuk memblokir akses terhadap mitigasi kerusuhan

pemberontakan sosial dengan sendirinya. Maknanya, kekuatan di sosial media, tanpa didukung kekuatan di dunia nyata maka tidak akan bermakna apa-apa.

Namun sosial media tidak sepenuhnya salah, karena sosial

memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Jelas, media sosial bukanlah faktor utama, dan keseluruhan konteks itu penting. Kerusuhan dan pemberontakan tidak dapat dihasut melalui media sosial kecuali iklim politik dan sosial kondusif untuk kejadian semacam itu. Media sosial dapat dianggap sebagai alat untuk mendukung atau memfasilitasi konflik berbasis informasi, dan mungkin tidak akan cukup untuk menciptakan

media adalah alat. Sorotan publik pada kontribusi sosial media terhadap konflik dan polarisasi masyarakat disebabkan algoritma yang dikembangkan oleh perusahaan sosial media yang dianggap menimbulkan efek "echo chamber". Efek ini merupakan suatu efek metaforis, dimana informasi, gagasan, atau keyakinan diperkuat oleh komunikasi dan pengulangan di dalam sistem yang didefinisikan.

Pada ruang efek "echo chamber", sumber resmi sering kali tidak dipertanyakan dan pandangan yang berbeda saling bersaing untuk disensor, dilarang, atau kurang terwakili. Akibatnya adalah homogenisasi informasi dari apa yang dianggap sependapat dan mewakili perasaan subyektifitas seseorang, serta terjadinya penguatan informasi terhadap orang-orang di dalamnya. Efek "echo chamber" akan sangat berdampak ketika informasi yang disebarluaskan adalah informasi palsu, hoaks dan sejenisnya.

### Politik Post-Truth dan Pembusukan Kebenaran

Teknologi selalu memiliki dua sisi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi digital, maka persepsi ancaman terhadap penggunaan sosial media tidak lain digunakan sebagai alat propaganda politik.

Fahmi Ramadhiansyah menyatakan, para periset telah menggunakan istilah "propaganda komputasi" untuk menjelaskan akumulasi *platform* media sosial, agen otonom, dan data besar yang ditugaskan untuk manipulasi opini publik. Propaganda komputasi sendiri adalah penggunaan algoritma, otomasi, dan manusia kurasi dengan sengaja menyebarkan informasi yang menyesatkan melalui jaringan media sosial.

Media sosial telah berubah menjadi *platform* dimana politik Post-Truth dan propaganda komputasi saling tumpang tindih di tengah teknologi algoritma, yang mengubah politik demi kebaikan. Pemanfaatan media sosial yang tidak bertanggung jawab

sebagai alat politik akan semakin memperkuat perpecahan antara kelompok politik, dan yang lebih buruk lagi, memperbesar pemikiran sempit di kalangan masyarakat.

Samuel Woolley dan Philip Howard, menjelaskan, media sosial merupakan *platform* penting untuk pelibatan politik dan kanal yang krusial untuk menyebarkan konten berita. Media sosial juga merupakan media primer dimana kaum muda mengembangkan identitas politik mereka. Di beberapa negara hal ini bisa disebabkan oleh adanya beberapa bentuk layanan informasi seperti Facebook, yang mana secara efektif memonopoli *platform* sosial media dalam kehidupan publik.

Di beberapa negara demokrasi, mayoritas pemilih menggunakan media sosial untuk berbagi berita dan informasi politik, terutama selama pemilihan. Disamping itu hanya sebagian kecil masyarakat di negara demokrasi yang memiliki akses reguler ke media sosial. *Platform* semacam itu masih merupakan infrastruktur dasar untuk percakapan politik antara para jurnalis, pemimpin masyarakat sipil, dan elit politik.

Media sosial secara aktif digunakan sebagai alat untuk manipulasi opini publik, meski dengan beragam cara dan topik yang berbeda. Di negara-negara otoriter, *platform* media sosial adalah alat utama untuk kontrol sosial, terutama berlaku selama politik dan krisis keamanan. Di sisi lain di negara-negara demokrasi, media sosial secara aktif digunakan untuk propaganda komputasi baik melalui usaha yang luas dalam manipulasi opini atau percobaan yang ditargetkan pada segmen

masyarakat tertentu.

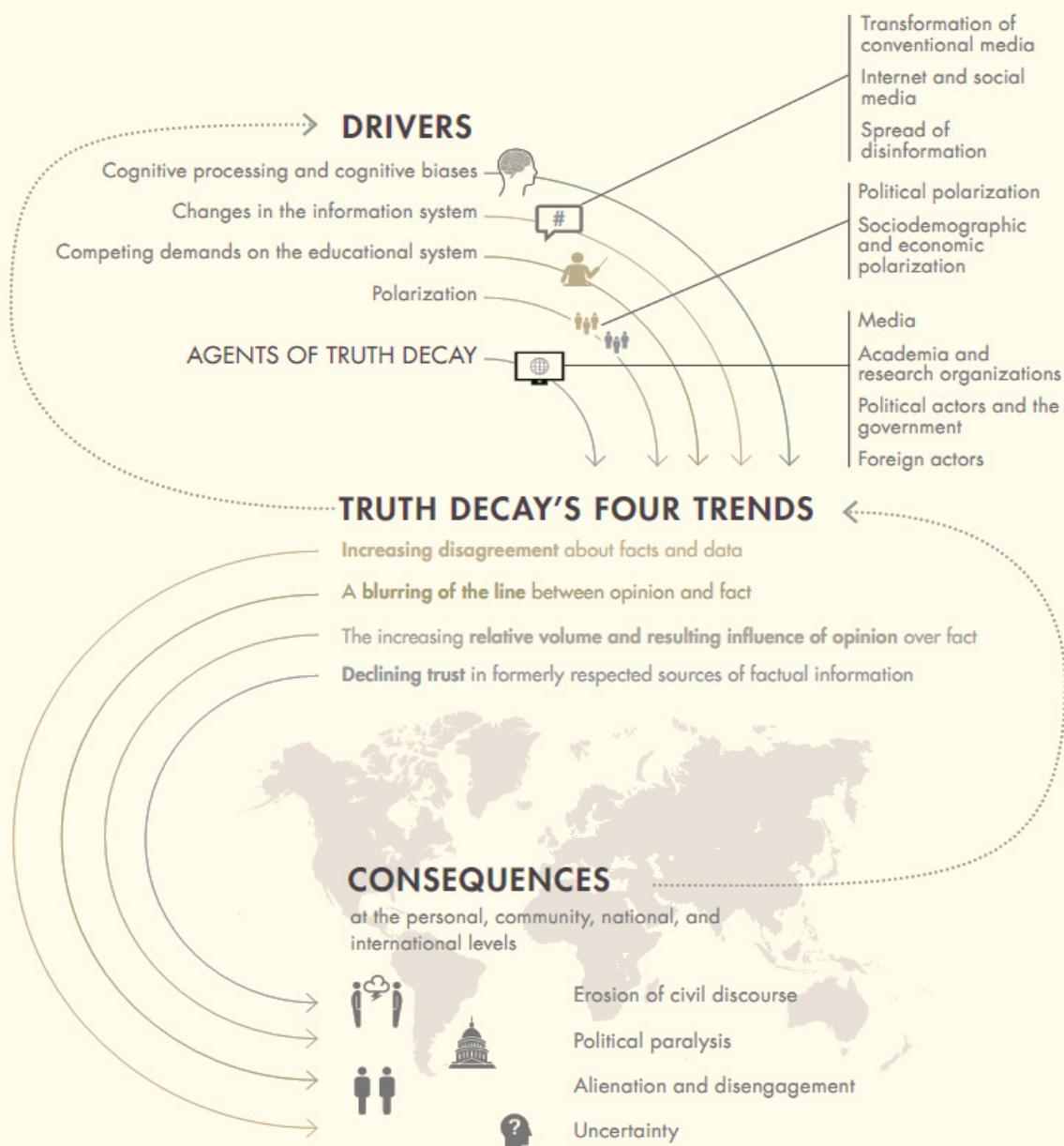
Media sosial memainkan peran penting dalam peredaran gagasan tentang kebijakan publik dan politik. Namun, semakin banyak platform media sosial yang condong untuk kampanye disinformasi manipulatif. (Forelle et al., 2015; Woolley, 2016; Gallacher et al., 2017)

Sebuah lembaga nirlaba dari Amerika Serikat, RAND, merilis sebuah dokumen yang berjudul "*Declining Trust in Facts and Institutions Imposes Costs on Society*" yang mempelajari fenomena "*Truth Decay*" atau "*Pembusukan Kebenaran*" yang menjadi fenomena di masyarakat Amerika Serikat. *Truth Decay* dideskripsikan sebagai berkurangnya fakta dan analisis dalam kehidupan publik masyarakat Amerika. Hal tersebut ditandai dengan tren: (1) meningkatnya ketidaksepakatan tentang fakta dan interpretasi analitis terhadap fakta dan data; (2) kaburnya batas antara opini dan fakta; (3) meningkatnya volume dan pengaruh yang dihasilkan atas opini dan pengalaman pribadi terhadap fakta; dan, (4) menurunnya kepercayaan pada sumber fakta yang dulu dihormati.

Penyebab dari *Truth Decay* ditenggarai karena faktor berikut: (1) bias kognitif; (2) munculnya media sosial dan perubahan lainnya terhadap lingkungan informasi; (3) tuntutan terhadap sistem pendidikan yang terbatas kemampuannya untuk mengikuti perubahan ekosistem informasi; dan, (4) polarisasi politik, sosial dan ekonomi masyarakat.

Dampak dari "*Pembusukan Kebenaran*" ini antara lain:

Gambar 3. Pembusukan Kebenaran Sebagai Sistem

**Figure 5.1**  
**Truth Decay as a System**

Sumber: Jennifer Kavanagh, Michael D. Rich, *Truth Decay, An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life*, RAND Corporation, 2018, hal. xvii.

pengikisan akan diskursus sipil, kelumpuhan politik, keterasingan dan ketidakterikatan individu dari institusi politik dan kemasyarakatan, dan ketidakpastian kebijakan di tingkat nasional. Selain itu, "Pembusukan Kebenaran" dalam propaganda politik melalui berita palsu, hoax yang diamplifikasi melalui sosial media mengakibatkan

biasnya informasi. Tren tersebut jika dicermati juga telah terjadi di Indonesia. Kondisi diatas juga merupakan indikator dari "Post-Truth Politics" dimana politik tidak lagi menggunakan akal sehat dan cenderung mengedepankan emosi karena bias informasi sebagai akibat dari propaganda politik.

Dian Basuki menuliskan, Filosof AC Grayling memperingatkan ihwal 'korupsi integritas intelektual' akibat praksis Post-Truth. Keriuh media sosial, menurut Grayling, merupakan salah satu muatan kunci dalam budaya Post-Truth. Di dalamnya terkandung unsur 'i-bite' di mana opini lebih kuat dan menenggelamkan bukti

atau fakta. Fenomena Post-Truth dapat dilukiskan dalam kalimat "Pendapatku lebih berharga daripada fakta-fakta." (Dian Basuki, Tempo Indonesiana, 2017)

Tak heran, banyak profesor dan doktor yang percaya dengan hoax. Hal ini diungkap dalam pemberitaan di berbagai media massa nasional (Media Indonesia - 5 Januari 2017, Republika - 4 Januari 2017, dan Tempo - 4 Januari 2017). Fakta ini dikuatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang menunjukkan kecenderungan korban berita bohong ataupun SMS (pesan singkat) penipuan malah orang-orang yang mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi.

Survei yang dilakukan oleh MASTEL (Masyarakat Telekomunikasi) pada 2017 menunjukkan hoax yang sering diterima adalah terkait dengan Sosial Politik (Pilkada, Pemerintah) sebanyak 91.8%, kemudian diikuti oleh isu SARA sebanyak 88%. Hoax ini disebarluaskan melalui sosial media (92.4%), aplikasi chatting (62.8%), situs web (34.9%) dan lainnya, dimana 40.6% responden menyatakan penyebaran hoax sebagai alat mempengaruhi opini publik.

Menurut Eko Sulistyo, fenomena Post-Truth di Indonesia dapat meluas karena empat sebab. Pertama, kemajuan teknologi informasi yang asimetris dengan kapasitas adaptasi pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kompetisi politik yang tidak

berkesudahan sejak pilpres 2014. Ketiga, adanya dukungan dari masyarakat tertentu pada ideologi ekstrim anti Pancasila. Keempat, adanya kegelisahan dengan perubahan dan perbaikan sistem yang dilakukan pemerintahan saat ini. (Eko Sulistyo, Media Sosial dan Fenomena "Post-Truth", Koran Sindo, 28 November 2017).

### Pemilu dan Ancaman Konflik Politik

Penggunaan sosial media sebagai alat politik terlihat nyata dalam Pemilu Presiden Indonesia 2014, Pemilu Presiden AS tahun 2016, dan Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 & 2017. Pasca reformasi, sebelum Pilkada DKI 2012, dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, dinamika politik nasional belum

Grafik1. Hasil Survei Masyarakat Telematika Indonesia



Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional Jakarta, 13 Februari 2017.

pernah terfragmentasi sedemikian rupa seperti saat ini. Pasca Pilpres 2014, serangan terhadap pemerintahan terpilih terus muncul dan berkembang terutama melalui sosial media. Pertarungan di dunia maya seringkali tidak lagi mengedepankan etika, cara-cara yang bijak, maupun taat pada aturan. Berita palsu dan hoax terus menjamur di berbagai jejaring sosial media, atau aplikasi pesan instan/*chat* dan mengakibatkan polarisasi di masyarakat. Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 oleh sebagian kalangan dianggap sebagai puncak dari konflik politik antar elit dan merambah ke masyarakat, yang menggunakan berbagai macam media maupun metode.

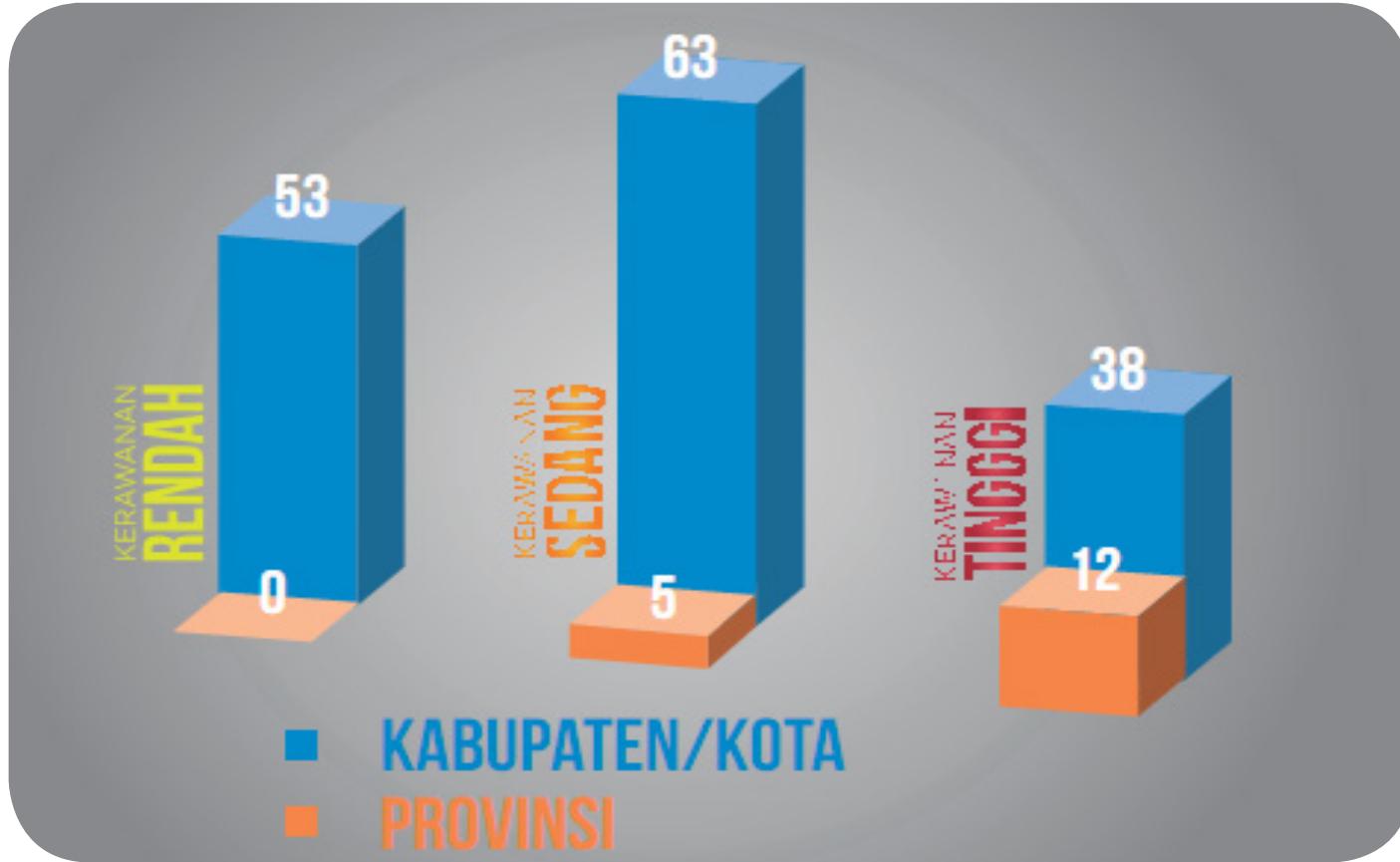
Tahun 2018 dan 2019 akan menjadi tahun politik Indonesia mengingat selama periode

tersebut akan berlangsung Pilkada serentak, serta Pemilu Presiden dan Legislatif. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, maka dalam tahun politik kondisi keamanan nasional bisa menjadi rentan terhadap ancaman konflik. Propaganda politik yang dilakukan oleh kelompok kepentingan yang menjurus ke konflik informasi, dapat mengancam tatanan dan harmoni di masyarakat.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis peta potensi konflik dalam Pilkada 2018. Setidaknya ada 3 wilayah yang memiliki potensi konflik karena politik identitas. Secara khusus, Bawaslu juga menuliskan tentang aspek sosial media pada Pilkada Provinsi, Kabupaten/Kota di tahun 2018.

Dari 17 provinsi yang akan menggelar Pilkada 2018, sebanyak 12 provinsi (71%) dari provinsi yang akan menggelar pilkada, masuk kategori tinggi tingkat penggunaan sosial media dalam menangkap isu-isu terkait pilkada. Tingkat penggunaan media sosial terkait isu-isu seputar pilkada, termasuk di antaranya terkait isu politik identitas hampir marak terjadi di semua daerah dengan derajat yang berbeda. Sebanyak 38 daerah (25%) masuk kategori tinggi tingkat penggunaan sosial media untuk isu-isu pilkada di tingkat kabupaten/kota. Sementara sebagian besar memang masuk kategori sedang sebanyak 63 daerah (41%). Daerah dengan kategori sedang dan tinggi ini termasuk ke kelompok potensial rawan terjadinya ketegangan di sosial media terkait isu-isu pilkada. Sisanya, hanya sebanyak 53

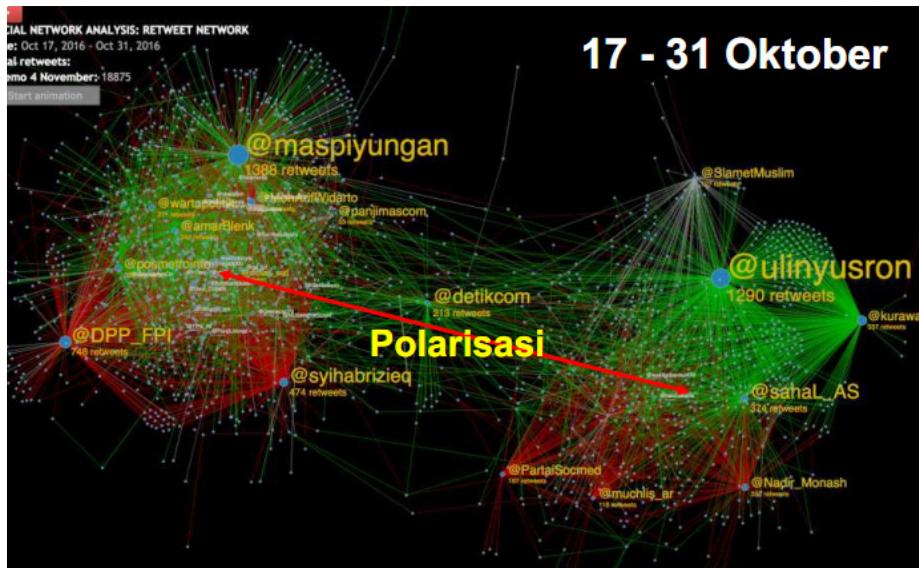
Grafik 2. Jumlah Daerah Berdasarkan Tingkat Kerawanan di Aspek Penggunaan Media Sosial



Sumber: Masyarakat Telematika Indonesia, Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional Jakarta, 13 Februari 2017.

daerah (34 %) yang masuk kategori rendah tingkat penggunaan sosial medianya terkait isu-isu pilkada. (Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018, 2017, hal. 123.)

Gambar4. Polarisasi di Dunia Maya



Penggunaan sosial media dapat berdampak negatif pada keamanan nasional dan konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional. Salah satu indikatornya adalah terjadinya polarisasi di masyarakat. Propaganda politik yang disebarluaskan dapat memecah belah masyarakat, menciptakan kubu-kubu, faksi-faksi, dan sentimen antarkelompok. Sementara bagi negara, hal ini mengancam proses pembuatan kebijakan dan demokrasi.

### Bela Negara

Himbauan sejumlah pihak agar menggunakan sosial media secara bijak rupanya masih sulit diwujudkan. Aturan-aturan hukum yang selama ini ada juga tidak benar-benar ketat diterapkan dan tidak berhasil mencegah atau meminimalisir penggunaan sosial media secara negatif. Dalam

jangka pendek, penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan di dunia maya, merupakan langkah yang harus dilakukan. Namun dalam jangka panjang, tentu hal ini menjadi tidak efektif bila masyarakat masih rendah pemahaman dunia digital.

tanggung jawab banyak pihak. Tidak hanya keluarga, sekolah, ataupun lingkungan. Di masyarakat baik dalam kehidupan riil maupun di dunia maya, telah banyak kegiatan untuk mendukung literasi digital, dan membentuk komunitas untuk menangkal hoax ataupun berita palsu. Meski demikian, pekerjaan tersebut tentu melelahkan di tengah minimnya minat membaca masyarakat yang lebih mengutamakan sentimen dan egosentrisme. Fakta dan data tidak lagi memiliki nilai obyektif namun dianggap menguatkan opini kelompok yang berseberangan dan mendiskreditkan kelompok lainnya.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai Lembaga/Kementerian yang menginisiasi kegiatan Bela Negara dapat mengambil peran ini dengan cara memasukkan kurikulum mengenai literasi digital. Dengan demikian metode ini dapat menjadi suatu solusi alternatif jangka panjang untuk literasi digital untuk menciptakan generasi yang cinta terhadap tanah air, negara dan bangsa melalui pemanfaatan informasi dan sosial media secara tepat guna. Terlebih lagi, dikaitkan dengan konteks perang modern atau perang baru, yang dikenal melalui berbagai macam istilah seperti *hybrid warfare*, *cyber warfare*, *information warfare*, *netwar*, dan lain sebagainya, maka kemampuan memilah dan mengolah informasi mutlak diperlukan terutama bagi generasi milenial.\*\*\*

Kolonel Todd Stratton, Direktur Air Forces Cyber Forward menyatakan kunci superioritas atau dominasi di dunia maya terletak pada orang/SDM. Untuk itu perlu adanya pelatihan berpikir kritis. Maka, untuk menangkal perang informasi di dunia maya dari berita palsu, hoax dan sejenisnya, dibutuhkan tidak hanya penguasaan dan pemahaman teknologi informasi. Akan tetapi hal ini membutuhkan literasi digital yang mencakup pemahaman mengenai aturan, etika, termasuk mengidentifikasi valid atau tidaknya suatu informasi. Dengan demikian, diharapkan muncul kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap munculnya suatu informasi/berita yang mengadu domba dan berpotensi menciptakan perpecahan di masyarakat.

Kewajiban mengedukasi masyarakat terkait penggunaan sosial media, sejatinya merupakan

# PUSREHAB KEMHAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN PRODUKTIVITAS PENYANDANG DISABILITAS PERSONEL KEMHAN DAN TNI

Oleh:

Erlin Sudarwati,SKM, MM

Kasubbid Minvok Bid Rehabvok Pusrehab Kemhan



## Pendahuluan

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahsakitan. Tugas tersebut dilaksanakan dalam bentuk Rehabilitasi Terpadu bagi Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI.

Rehabilitasi Terpadu merupakan kegiatan rehabilitasi yang diselenggarakan secara terpadu, baik secara internal di Pusrehab Kemhan maupun secara eksternal di luar Pusrehab Kemhan. Rehabilitasi Terpadu bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan, menumbuhkan semangat/motivasi, meminimalisasi ketergantungan pada orang lain, tumbuh percaya diri, dan dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat sesuai kemampuannya, sehingga merasa

diterima dan dihargai sebagai insan yang mandiri dan produktif.

## Penyandang Disabilitas

Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir, Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus

bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang Cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Banyak orang bingung dengan istilah Cacat, Difabel, dan Disabilitas. Bahkan selama ini masyarakat lebih familiar menggunakan istilah penyandang cacat. Sekilas ketiga istilah memiliki makna yang sama, namun akan diterima berbeda secara psikologis bagi para penyandangnya ketika berbaur dalam lingkungan sosial, dimana label yang disematkan bagi mereka akan menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cacat merujuk pada barang atau benda mati, atau dalam kata lain afkir. Tentunya tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan

dengan kondisi tersebut. Istilah Penyandang Cacat mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena 'tercela' atau cacat.

Difabel merupakan akronim dari *Different Ability*, atau *Different Ability People*, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Sedangkan istilah Disabilitas merupakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi. Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization (WHO)*, yaitu "Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or

*participation restrictions*" (Disabilitas adalah "payung" terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi).

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sedangkan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI adalah Prajurit TNI termasuk Prajurit Siswa dan PNS Kemhan, Mabes TNI, dan Angkatan yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang disebabkan oleh karena melaksanakan tugas kedinasan





maupun bukan karena dinas yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak.

Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI sebagian besar merupakan prajurit TNI yang ditinjau dari segi tugas sebagai seorang prajurit yang tingkat patriotiknya telah teruji. Para prajurit menjadi disabilitas pada umumnya dikarenakan menjalankan tugas atau dinas keprajuritan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI atau mengamankan wilayah dan tugas-tugas lain terkait dengan tugas dinas keprajuritan. Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI sudah selayaknya dihargai sebagai abdi negara, oleh karena itu sangat dipahami apabila negara dan bangsa memberikan penghargaan tersebut melalui upaya-upaya konkret dan jelas yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas itu sendiri dan keluarganya.

Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI secara psikologis mereka menjadi kurang percaya diri karena dari postur tubuh yang semula sehat perkasa, karena risiko dalam menjalankan tugasnya menyebabkan menjadi disabilitas,

fungsi fisiknya tidak seperti dulu lagi. Namun sesungguhnya penyandang disabilitas tidak ingin dikasihani, tetapi perlu diberikan kesempatan dan difasilitasi agar kekurangan yang ada masih dapat memberikan kebanggaan bagi keluarga serta dapat disumbangkan untuk membangun nusa dan bangsa.

### Pusat Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu sarana dan upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Fasilitas rehabilitasi tersebut berupa Pusat Rehabilitasi (*Rehabilitation Center*) yang menyelenggarakan rehabilitasi secara terpadu dalam satu atap berupa rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.

Pusat Rehabilitasi dilaksanakan bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di semua negara terdapat fasilitas rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Menurut WHO (*World Health Organisation*), jumlah penyandang disabilitas di suatu negara adalah 10%

dari jumlah penduduknya. Oleh karena itu diperlukan suatu fasilitas rehabilitasi bagi penyandang disabilitas berupa Pusat Rehabilitasi (*Rehabilitation Center*), yang diharapkan akan dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Di Indonesia sendiri, pusat rehabilitasi tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah namun lembaga non pemerintah dan masyarakat juga ikut andil dalam membantu kemandirian para penyandang disabilitas. Pusat Rehabilitasi yang ditujukan bagi Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI, diselenggarakan di bawah Kementerian Pertahanan, yaitu Pusrehab Kemhan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok untuk merehabilitasi para Penyandang Disabilitas personel Kemhan dan TNI, Pusrehab Kemhan menyelenggarakan "Rehabilitasi Terpadu" yang merupakan rangkaian kegiatan rehabilitasi yang meliputi pelayanan rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial, dan pelayanan perumahsakitan bagi Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI, yang dilaksanakan secara terpadu baik secara intern di Pusrehab Kemhan maupun secara ekstern di Kotama/satuan daerah.

### Rehabilitasi Terpadu Pusrehab Kemhan

Rehabilitasi Terpadu bagi Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI merupakan suatu upaya memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan, menumbuhkan semangat/motivasi, meminimalisasi

ketergantungan pada orang lain dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat sesuai kemampuannya, sehingga dapat diterima dan dihargai sebagai insan yang mempunyai kemampuan (mandiri dan produktif).

Rehabilitasi Medik merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi penyakit atau cidera melalui paduan intervensi medik, keterapi fisik dan rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Pelayanan Rehabilitasi Medik di Pusrehab Kemhan terdiri dari Pelayanan Kesehatan Umum (meliputi kesehatan preventif dan promotif termasuk kesampaatan jasmani para penyandang disabilitas) dan Pelayanan Kesehatan Khusus (meliputi kesehatan rehabilitatif; fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, pemberian alat bantu/ortose dan pembuatan alat ganti tubuh/protese).

Rehabilitasi Vokasional merupakan upaya memberikan berbagai keterampilan, ilmu pengetahuan

dan teknologi menuju ke arah pengembalian kemampuan untuk bekerja secara optimal sesuai kemampuan fisik penyandang disabilitas. Pelayanan Rehabilitasi Vokasional di Pusrehab Kemhan meliputi 15 jurusan keterampilan yaitu Automekanik Mobil, Automekanik Motor, Teknik Pendingin, Teknik Komputer, Operator Komputer, Elektronika, Las, Penjahitan, Desain Grafis, Fotografi, Musik, Pertukangan Kayu, Pertanian Terpadu, Tata Boga, dan Massage

Rehabilitasi Sosial merupakan upaya mengembalikan kemampuan psikis dan sosial penyandang disabilitas agar dapat memulihkan kepercayaan diri dan mampu melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Pusrehab Kemhan terdiri dari Bimbingan Psikologi Sosial, Kunjungan Rumah (Home Visit), Bimbingan Lanjut (Bimjut), dan Bimbingan Olah Raga dan Seni.

Pelayanan Perumahsakitan merupakan pelayanan medik, penunjang medik, dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta

penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rumah Sakit dr Suyoto Pusrehab Kemhan memberikan pelayanan kesehatan bagi para peserta Rehabilitasi Terpadu, berorientasi kepada keselamatan pasien dengan patokan standar Komite Akreditasi Rumah sakit yang berlaku. Pelayanan perumahsakitan bagi Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI di Pusrehab Kemhan meliputi Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif.

Sesuai dengan visi Pusrehab Kemhan yaitu "Mewujudkan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI Mandiri dan Produktif", maka Pusrehab Kemhan berupaya untuk memberikan pelayanan Rehabilitasi Terpadu secara profesional. Dengan demikian Pusrehab Kemhan mempunyai misi antara lain meningkatkan kualitas pelayanan Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Vokasional, Rehabilitasi Sosial, Pelayanan Perumahsakitan dan dukungan administrasi yang memadai.

Sampai saat ini Pusrehab Kemhan merupakan satu-satunya Pusat Rehabilitasi (*Rehabilitation Center*) yang memberikan pelayanan kepada para Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Pusrehab Kemhan berupaya untuk menjadi Rehabilitator yang profesional demi mewujudkan Penyandang Disabilitas yang mandiri dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.\*\*\*



# PERAN PUSAT KONSTRUKSI BARANAHAH KEMHAN DALAM RANGKA PENGUATAN PERTAHANAN NEGARA INDONESIA MELALUI SARANA DAN PRASARANA PERTAHANAN TNI

Oleh:

MUHAMMAD FERRY MUHROM, S.T., M.Si

Alumni Sekolah Stratejik dan Global Universitas Indonesia



## Pendahuluan

**S**etiap negara mempunyai sistem pertahanan sendiri untuk mempertahankan teritorialnya baik itu daratan, lautan maupun udara. Dengan mempergunakan sistem pertahanan yang telah negara tersebut pilih, maka diharapkan dapat mempertahankan wilayah serta kedaulatan negaranya dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negerinya sendiri. Dalam rangka mempertahankan wilayah negara dan kedaulatan maka perlu

dilakukan pembangunan di bidang pertahanan, diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana pertahanan bidang konstruksi.

Pertahanan nasional suatu negara merupakan upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara secara nasional yaitu teritorial dan kedaulatannya terhadap negara-negara lain. Dalam rangka mempertahankan wilayahnya maka faktor keamanan negara dan bangsa menjadi faktor penentu dari Pertahanan Negara

dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Menurut Undang-Undang No 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan

Negara. Sedangkan pada ayat (5) menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI untuk keselamatan segenap bangsa dan negara dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik secara kekuatan militer maupun Nir militer, baik yang datang dari luar ataupun yang datang dari dalam negaranya sendiri.

Pertahanan militer yang kuat dari segi kualitas maupun kuantitas merupakan bagian dari kedaulatan sebuah Negara. Sistem pertahanan tersebut pada masa damai bukan untuk melancarkan serangan terbuka, melainkan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan Negara yang secara geografis melingkupi darat, laut dan udara, serta melindungi setiap warga negaranya. Dalam keadaan damai kekuatan militer mampu menjadi *deterrant factor* (faktor

penggantian) bagi negara-negara lain. Kualitas dan kuantitas yang baik dari pertahanan militer harus didukung sarana dan prasarana Pertahanan yang memadai sebagai alat penunjang pertahanan negara dalam rangka kepentingan nasional suatu bangsa.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menyatakan, Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Kekuatan pertahanan pada hakekatnya merupakan kekuatan militer, yang terdiri dari sumber

daya manusia (prajurit), material, fasilitas dan kesehatan militer yang dalam pengelolaannya sudah lebih baik dari pada pengelolaan potensi pertahanan, sebagai entitas alat pertahanan negara perlu adanya penanganan berkelanjutan agar selalu siap apabila diperlukan oleh negara, kesiapan (*readiness*) merupakan unsur utama dari militer, disiplin, keterampilan (*Skill*) dan keberanian (*braveness*) yang kesemuanya memerlukan latihan dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai (Supriyatno 2014:107).

#### Peran Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan

Berdasarkan Permenhan Nomor 58 tahun 2014, Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) yang merupakan unsur pendukung fungsi dan tugas dari Kementerian Pertahanan yang bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan dilingkungan Kemhan



dan TNI. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Sarana Pertahanan menyelenggarakan penyusunan kebijakakan teknis, rencana, dan pengelolaan di bidang sarana pertahanan TNI meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan serta sertifikasi kelayakan sarana dan prasarana pertahanan TNI.

Peran Pusat Konstruksi (Puskon) Baranahan Kemhan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pertahanan TNI dalam bidang bangunan konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 tahun 2014 pasal 1023 bahwa Pusat Konstruksi Baranahan berperan sebagai perencana bangunan konstruksi, pengendalian bangunan konstruksi, dan pengawasan bangunan konstruksi sarana pertahanan.

Sebagai Pembanding peran dari organisasi alat pertahanan negara yaitu negara Amerika Serikat

yang memiliki Korp Insinyur yaitu *The United States Army Corps Of Engineers (Usace)* yang memiliki ± 650 personel militer, 34.600 pegawai negeri sipil, ilmuwan, personil dengan keahlian khusus dan bekerja dalam kesatuan bidang teknik dan penanganan lingkungan (Yuhandana, 2008 : 1). Lingkup pekerjaan dari Korps Insinyur USA ini meliputi :

fasilitas militer Angkatan Darat (AD) dan Angkatan Udara (AU).

3. Penyediaan *Detail Engineering Design (DED)* dan manajemen konstruksi dalam rangka mendukung satuan pertahanan dan Agensi Federal (*Interagency and International Services*).
4. Melaksanakan fungsi keteknikan dalam rangka memberikan layanan kepada publik dan masyarakat umum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat (Yuhandana, 2008 : 2).

Puskon Baranahan Kemhan dalam perannya sebagai perencana bangunan konstruksi, pengendalian bangunan konstruksi serta pengawasan bangunan-bangunan militer bidang pertahanan yang berkaitan dengan pertahanan di





jajaran TNI yang bersifat strategis berdasarkan skala prioritas seperti pembangunan pangkalan, teritorial perbatasan wilayah negara, peningkatan pelayanan seperti Rumah Sakit di Kementerian Pertahanan dan di jajaran TNI serta pembangunan/renovasi fasilitas pendidikan di masing-masing Komando Wilayah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku baik secara teknis maupun administrasi serta pembangunan rumah dinas bagi anggota Kemhan dan TNI dalam rangka memberikan kesejahteraan untuk personel dilingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

#### **Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan**

Menurut Makmur Supriyatno (2014) dalam bukunya Tentang Ilmu Pertahanan dinyatakan bahwa Pertahanan Negara

merupakan tugas pokok negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berpedoman pada Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden RI No 97 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, maka Kementerian Pertahanan mempunyai visi dan misi dalam sistem pertahanan Negara yang berkedaulatan serta mandiri. Kekuatan pertahanan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin integritas wilayah dengan cara melakukan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan yang dalam pelaksanaannya secara berkelanjutan, berwawasan

lingkungan dan berketahanan nasional yang berdasarkan wawasan Nusantara.

Pertahanan suatu negara dikembangkan dalam rangka untuk mewujudkan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Kemampuan sistem pertahanan disusun berdasarkan strategi pertahanan negara untuk merefleksikan kemampuan kekuatan pertahanan serta sumber daya nasional. Strategi pertahanan negara dikembangkan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yaitu penangkal berupa kemampuan pertahanan Negara untuk mengatasi ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Terutama dengan daerah perbatasan suatu negara tidak terlepas dari aspek ancaman terhadap kedaulatan suatu negara, dengan adanya ancaman di daerah perbatasan maka harus dilakukan pencegahan.



detikcom

Sehubungan hal tersebut sarana dan prasarana (Sarpras) Pertahanan TNI di Bidang Konstruksi yang menyangkut bidang teritorial perbatasan wilayah negara diposisikan menjadi potensi strategis. Potensi ini dirasakan dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Selain itu juga pada aspek politik luar negeri dan aspek pertahanan negara di daerah perbatasan antara negara yang berbatasan wilayahnya, baik yang bernilai positif, maupun negatif.

Kementerian Pertahanan merupakan suatu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam penyusunan strategi pertahanan dalam pencapaian tujuan nasional yang di susun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan,

melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Menurut Makmur Supriyatno dalam bukunya Pertahanan dan Perbatasan Darat Internasional bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai suatu negara harus mendirikan dan menentukan garis batas darat antar negara yaitu teritorial atau wilayah serta penduduknya, dengan batas-batas terluar dari teritorialnya. Batas antar negara tersebut mencerminkan batas-batas kekuasaan dan hak-hak suatu negara atau kedaulatan negara tersebut atas teritorial dan warga negaranya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kemhan dalam hal ini Puskon Baranahan Kemhan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana "security belt". Pembangunan Sarpras yang merupakan Rencana Strategis ini berupa pembangunan Jalur (jalan) Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) sepanjang perbatasan

yang menghubungkan antar Pos Pamtas dengan pembangunan jalan penghubung antara Pos Pamtas dengan perkampungan di Kalimantan. JIPP ini juga merupakan salah satu strategi dari Kementerian Pertahanan dalam menjaga wilayah perbatasan Negara.

Strategi pertahanan merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang pada awalnya hanya terfokus pada cara-cara militer dalam perang untuk memenangkan suatu pertempuran. Namun dengan perkembangan zaman serta teknologi maka ruang lingkup dari strategipertahananmenjadisemakin kompleks. Perihal peperangan tidak lagi di ukur dari menang atau kalah dalam pertempuran, akan tetapi siapa yang dengan cepat dapat memanggil bala bantuan sehingga dapat menyerang kembali.

Dengan adanya pembangunan JIPP yang dibangun diharapkan dapat menjawab tantangan strategi pertahanan dan memberikan

penguatan terhadap Ketahanan Nasional Indonesia yang merupakan bagian dari Pancagatra yaitu Gatra Pertahanan dan Keamanan Nasional serta dalam rangka meningkatkan Ekonomi di daerah Perbatasan. JIPP ditambah dengan peningkatan faktor keamanan di daerah perbatasan dengan menempatkan prajurit TNI AD, maka diharapkan dapat meningkatkan ekonomi rakyat setempat. Segala upaya yang dilakukan tersebut nantinya akan berdampak kepada menguatnya rasa persatuan masyarakat setempat.

### Tantangan dan Harapan di Masa Mendatang

Diera globalisasi sekarang ini tidak hanya perdagangan barang yang bebas masuk ke Indonesia, akan tetapi sudah mencakup di bidang jasa seperti jasa desain arsitektur dan jasa lainnya. Oleh karena itu, Indonesia tidak boleh berdiam diri dalam menghadapi

proses globalisasi yang semakin mengglobal ini. Globalisasi juga berimbang kepada organisasi Pusat Konstruksi Baranahan yang tertantang untuk mengembangkan organisasinya.

Sementara ini pemenuhan kebutuhan sarpras pertahanan Bidang Konstruksi seperti pembangunan pangkalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan rumah dinas serta bentuk lainnya menjadi tanggung jawab Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan. Dengan didukung Sumber Daya Manusia pertahanan (Sipil dan TNI) dengan kualitas yang siap bersaing dengan negara-negara lain dan sesuai kualifikasi bidangnya masing-masing maka Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan dapat menangani tidak hanya proyek konstruksi militer. Puskon Baranahan berpotensi untuk mengerjakan proyek-proyek sipil lainnya, seperti pekerjaan kontruksi, konsultan perencana dan konsultan

pengawas baik dalam skala nasional ataupun Internasional.

Di masa mendatang juga menuntut peran Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan untuk mengembangkan Organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi yang pro kepada kepentingan nasional.

Sarana dan Prasarana Pertahanan TNI bidang konstruksi merupakan salah satu hal terpenting dalam memperkuat pertahanan NKRI dalam rangka kepentingan Nasional guna mendukung Ketahanan Nasional Indonesia. TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara perlu di dukung dengan sarana dan prasarana pertahanan bidang konstruksi yang memadai.\*\*\*



detikcom



Sumber: bhataramedia.com

## MENGINGAT KEMBALI “ILMU DAN AMAL, GEEST-WIL-DAAD

Oleh:

Prisca Delima, M.Sn., M.Si(Han)

Pengamat lingkungan sosial dan budaya

Jagat maya belum lama ini ramai dengan perbincangan tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kini ada berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018. Namun demikian, agaknya yang lebih marak dalam gosip netizen adalah besaran gaji para pejabatnya, bukan tugas yang diemban, apalagi tentang mengapa badan ini ada atau perlu ada. Gosip semacam itu mungkin timbul sejalan dengan pembahasan tunjangan hari raya. Hal yang selalu berulang dari tahun ke tahun menjelang Lebaran.

Tanpa hendak turut serta dalam polemik besaran gaji, BPIP menarik untuk diperhatikan. Tugas yang diembannya terkesan begitu

kompleks dan khas menurut bahasa hukum yang memang gemar menggunakan kalimat panjang dan tidak tuntas dalam satu tarikan napas. Tertera dalam lamannya, “BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,

kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.” Dalam budaya komunikasi instan yang kini akrab dengan masyarakat, kalimat panjang seperti itu sulit dicerna apalagi dipahami. Satu hal yang pasti, kalimat tersebut tidak bisa masuk dalam satu cuitan pada salah satu *platform* media sosial populer. Hal yang sudah pasti mengundang protes warga Gen-Z.

### Perlukah Badan Tersebut Dibuat?

Pertanyaan itu kerap muncul dalam komunikasi netizen, warga Gen-Z, yang bisa jadi berjarak dengan Pancasila. Warga yang mungkin pula tidak hapal dengan kelima sila dasar negara, apalagi dengan sekian

banyak butir pengamalan Pancasila yang dahulu pernah begitu lekat pada era penataran P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, bagi yang bertanya-tanya P4 itu kode apa. Penataran P4 pernah begitu "dicintai" karena diwajibkan di mana-mana, menjadi momok dan berusaha dihindari karena penyampaiannya yang kerap "bagai cerita pengantar tidur" karena begitu membosankan. Namun demikian, tidak bisa ditepis bahwa Penataran P4 sebagai bentuk sosialisasi pembangunan karakter bangsa di masa Orde Baru begitu berhasil, meskipun kemudian lenyap bagai ditelan bumi di era reformasi.

Membahas ideologi Pancasila tidak bisa lepas dari presiden pertama Republik Indonesia. Paduka yang Mulia Dr. Ir. Soekarno, demikian beliau kemudian disebut setelah diangkat menjadi doktor

*honoris causa* dalam ilmu hukum oleh Senat Universitas Negeri Gadjah Mada pada 19 September 1951. Pemberian derajat doktor *honoris causa* ini tentu bukannya tanpa pertimbangan. Meskipun bukan ilmuwan dalam bidang hukum, inilah pengakuan terhadap jasa Soekarno dalam meletakkan dasar filsafat negara Indonesia.

Soekarno menolak disebut pencipta Pancasila, apalagi penemu atau penyusun teori analisis Pancasila. Karena beliau memang bukan demikian. Dalam anggapan Soekarno, Pancasila adalah rasa yang sudah ada dan terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia. Dengan menerima gelar kehormatan, beliau lebih ingin agar Pancasila dapat bermanfaat "bagi hidup dan suburnya ilmu pengetahuan". Itulah yang disebutkannya sebagai bentuk apresiasi dalam pidato "Ilmu dan Amal, Geest-Wil-Daad" saat

pengukuhan sebagai Doktor *Honoris Causa*.

Soekarno menekankan bahwa ilmu pengetahuan hanya akan berharga jika dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik kehidupan manusia, berbangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, ilmu perlu dihubungkan dengan amal, pengetahuan dengan perbuatan, sehingga "pengetahuan adalah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin pengetahuan." Hal yang tentunya sangat bertolak belakang dengan refleks cepat "salin-tempel-sebarkan" di era media sosial yang didominasi suara masyarakat yang kurang memiliki literasi media saat ini.

Geest-Wil-Daad secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai Semangat-Kemauan-Tindakan. Geest-Wil-Daad adalah rentetan kejadian yang menurut Soekarno



Sumber: politictoday.com



Sumber: wikimedia.org

mendasari segalanya. Geest - semangat timbul karena adanya pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman yang ada tersebut kemudian memicu Wil - kemauan. Dan kemauan kemudian memicu terjadinya Daad - tindakan. Geest-Wil-Daad, ketiganya saling bertautan satu sama lain, karena tindakan yang terencana tidak dapat terwujud tanpa ada kemauan yang dipicu oleh suatu pemahaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Soekarno menginginkan transformasi perikehidupan bangsa ke arah yang lebih maju, dengan mengutamakan kemauan kolektif yang didorong semangat kolektif sehingga dapat terjadi tindakan kolektif pula. Trilogi semacam itu kerap didengungkannya sebagai *nationale geest-nationale wil-nationale daad*. Semangat, kemauan, tindakan bersama sebagai satu bangsa untuk mewujudkan tujuan nasionalnya.

Dengan membentuk BPIP, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin politik. Pemimpin yang berupaya mengajak masyarakat yang dipimpinnya agar lebih mengamalkan Pancasila. Upaya awal untuk memobilisasi bangsa agar mengenal lebih dekat dan mau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Apakah itu cukup? Soekarno mengingatkan dalam pidatonya "tanpa ada kemauan manusia, tidak ada kemauan nasional; tanpa ada kemauan nasional, tidak ada perbuatan nasional." Untuk hal itu, penting ada kecakapan pemimpin yang mengaktivinasinya. Mampukah BPIP mendorong pengamalan Pancasila secara radikal?

#### Ya, secara radikal.

Mengapa secara radikal? Tulisan ini adalah ajakan untuk

mengembalikan makna kata radikal ke deskripsi aslinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal berkorelasi positif, terkait sifatnya yang mendasar, yang keras menuntut perubahan, dan yang lebih penting lagi, maju dalam berpikir atau bertindak. Dalam krisis yang terjadi pada Indonesia saat ini, dengan begitu banyaknya kejadian yang kontra dengan ideologi Pancasila, maka perlu tindakan radikal pula untuk mengatasinya. Tindakan yang nyata terlihat sebagai perwujudan pengamalan Pancasila.

Perjuangan BPIP sekarang, termasuk juga para penggiat Bela Negara adalah untuk membuat Pancasila tidak hanya sebagai rangkaian kata yang dibacakan saat upacara bendera, tulisan yang terpampang di dinding, namun lebih sebagai amal, sebagai tindakan. Inilah upaya pembangunan berkelanjutan Pancasila agar selalu

tetap up-to-date dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan berkelanjutan Pancasila pada praktiknya adalah ikhtiar untuk menentukan harga dan nilai Pancasila dalam kehidupan, sekaligus juga kekuatan rasa dan kekuatan nyata masyarakat yang mengamalkannya dalam lingkungan kehidupan Indonesia. Tanggung jawab besaryangdibebankan kepada BPIP agar mampu merasukkan Geest-Wil-Daad kembali ke seluruh sendi kehidupan rakyat, terlebih lagi “memasarkan secara modern” kepada Gen-Z sebagai komponen penduduk terbesar di Indonesia dan menjadikannya nyata dalam praktik keseharian bangsa Indonesia.

Pancasila, sebagai warisan turun-temurun yang kemudian diberi kemasan rasa baru membutuhkan upaya pemasaran yang masif. Hal ini dapat pula dianggap sebagai menciptakan Attention-Interest-

Desire-Action Pancasila. Pendekatan *Attention-Interest-Desire-Action* Pancasila seperti apa yang diupayakan BPIP memang masih belum jelas hingga saat ini. Padahal hal tersebut dapat membantu para penggiat Bela Negara dalam mengomunikasikan materi terkait Pancasila kepada khalayak. Mau tidak mau, tindakan sosialisasi Pancasila yang bersifat paksaan dan indoctrinasi tetap diperlukan mengingat Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai struktur yang mendasari.

Dengan menjadikan BPIP sebagai lembaga resmi di bawah pemangku kekuasaan eksekutif, Presiden Joko Widodo tentu menginginkan BPIP berperan aktif dalam pendekatan *soft power* untuk menanggulangi kejadian terorisme yang mengemuka beberapa waktu terakhir. Dengan memberikan pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, sebagai struktur yang mendasari, maka diharapkan pula tindakan yang menolak

ideologi negara dapat sirna. Hal ini penting, karena apabila Pancasila sebagai dasar negara hancur, tentu Negara Kesatuan Republik Indonesia akan hancur pula sebagai konsekuensinya. Pancasila sebagai jiwa bangsa diyakini telah mengkultur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Walau dalam proses perjalannya terdapat sejumlah riak yang terus berupaya menggoyahkan Pancasila.

Pada akhir pidatonya sebagai Doktor *Honoris Causa*, Soekarno menyatakan “dengan menuju ke laut, maka sungai setia kepada sumbernya”, dengan pemahaman akan Pancasila, tentu kemauan kita untuk mengamalkannya akan terjadi. Geest-Wil-Daad. Pancasila tidak akan sakti, tanpa bangsa Indonesia mengamalkan nilai-nilai yang ada secara berkelanjutan. Geest-Wil-Daad Pancasila terjadilah secara berkelanjutan.\*\*\*



## MENHAN MENGHADIRI *SPECIAL FORCE EXHIBITION AND CONFERENCE 2018 (SOFEX)* DI YORDANIA



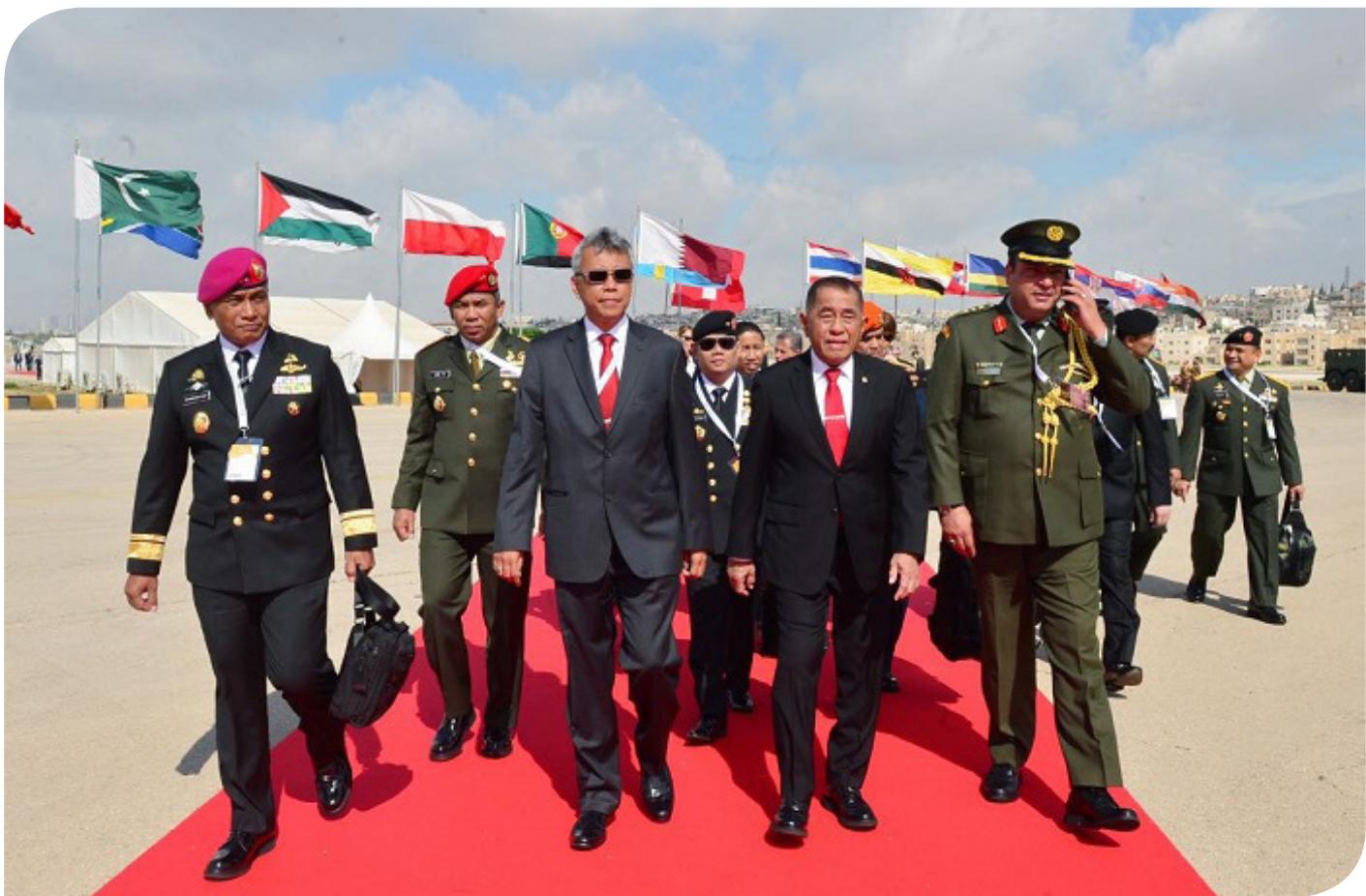
Potensi ancaman terorisme dan ekstrimisme saat ini tidak hanya melanda negara-negara di kawasan Timur Tengah saja namun sudah merambah Eropa dan Asia Timur. Melihat fenomena tersebut, Yordania berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam pembinaan Pasukan Khusus Angkatan Bersenjata guna menghadapi ancaman terorisme. Hal tersebut terungkap saat Perdana Menteri yang merangkap Menhan Yordania Hani Fawzi Al Mulki melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan RI Ryamizard Ryacudu di sela-sela Pembukaan *Special Operation Force Exhibition and Conference 2018 (Sofex)*, Selasa (8/5), di Amman, Yordania.

Dikatakan Menhan Yordania bahwa Yordania memiliki konsep dalam menangani terorisme yaitu dengan menguatkan cara berfikir rakyat agar tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh radikalisme maupun fundamentalisme. Yordania dalam waktu dekat akan mereformasi kurikulum pendidikan untuk menguatkan iman serta menekankan kepada ulama-ulama akan pentingnya ajaran Islam moderat dan perdamaian.

Menanggapi hal tersebut, Menhan RI mengungkapkan bahwa Indonesia bersama negara-negara di kawasan saat ini sedang menghadapi terorisme generasi ketiga. Generasi pertama adalah Al-

Qaeda, kedua adalah deklarasi ISIS pada tahun 2014 dan ketiga adalah kembalinya pejuang-pejuang ISIS dari Timur Tengah ke kawasan. Kelompok-kelompok tersebut berencana untuk membentuk divisi Asia Timur yang terdiri dari ISIS Indonesia, Malaysia dan Philipina.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Menhan RI, Indonesia telah melakukan kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Philipina. Selain itu Indonesia juga memiliki konsep penguatan *mindset* masyarakat agar tidak terpengaruh radikalisme dengan mengajak masyarakat berjuang bersama-sama menghadapi ancaman tersebut. Untuk itulah kerjasama trilateral ini dibangun agar ketiga negara



dapat saling bertukar pengalaman, keahlian dan pembelajaran mengenai Alutsista yang cocok untuk menghadapi terorisme.

Setelah melakukan pertemuan dengan PM sekaligus Menhan Yordania, Menhan RI Ryamizard Ryacudu melakukan pembicaraan bilateral dengan Raja Yordania King Abdullah II. Pembicaraan dilakukan di sela-sela penyelenggaraan *Special Operation Force Exhibition and Conference 2018 (Sofex)* di Amman Yordania, Selasa (8/5).

Dalam kesempatan tersebut Raja Abdullah II mengapresiasi kehadiran Menhan RI Ryamizard Ryacudu beserta rombongan dalam *Defence Expo Sofex 2018*. Kepada Menhan RI, Raja Yordania mengungkapkan harapannya untuk membangun kerjasama yang kuat kedua angkatan bersenjata dan

pasukan khusus dalam mengatasi terorisme dan ekstrimisme.

Yordania seperti halnya Indonesia menghadapi ancaman yang sama yaitu terorisme. Untuk itulah Sofex diselenggarakan yang memiliki konsep dimana negara-negara peserta Defence Expo dapat bertukar pengalaman dan keahlian operasi khusus (*special operation force*) dalam menangani terorisme

Yordania sangat mengapresiasi keahlian Indonesia dalam konsep "Perang Hutan Gunung". Raja Yordania berharap dapat bertukar pengalaman dan pandangan dengan Indonesia dalam mengatasi terorisme. Selain itu juga Yordania berharap dapat bertukar pengalaman dengan konsep yang digunakan Yordania untuk menghadapi terorisme.

Oleh karenanya Raja Yordania menyampaikan keinginan Pemerintah Yordania untuk membantu Indonesia terkait Alutsista yang digunakan untuk mengatasi terorisme. Selain itu Raja Yordania juga mengungkapkan keinginan negaranya untuk menjalin kerjasama dengan industri pertahanan Indonesia. Pihak Yordania juga berjanji untuk mengeluarkan *end user Certificate* untuk pembelian Alutsista Indonesia.

Dalam *Defence Expo Sofex* ini Menhan RI berkesempatan untuk menyaksikan penandatanganan MoU antara PT Pindad (Persero) dengan Industri Pertahanan Yordania. Saat menyaksikan penandatanganan MoU, Menhan RI didampingi Danjen Kopassus, Dankormar dan Dankorpaskhas.\*\*\*

## KASAL DAN SEKJEN KEMHAN MENYAMBUT KAPAL SELAM KRI ARDADEDALI-404



Setelah menempuh perjalanan selama 20 hari melintas lautan dari Korea Selatan, Kapal Selam terbaru TNI AL KRI Ardadedali-404 tiba di Indonesia. KRI Ardadedali-404 disambut oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Kamis (17/5) di Dermaga Kapal Selam Koarmada II, Ujung, Surabaya.

Sebelumnya pada tanggal 25 April yang lalu, KRI Ardadedali-404 berangkat dari Korea Selatan setelah diresmikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Ibu Nora Ryamizard Ryacudu di Galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co, Ltd (DSME), Okpo, Korea Selatan.

Kapal selam yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Widya Poerwandalu berlayar dari Korea Selatan menuju Indonesia dengan membawa 40 orang Anak Buah Kapal (ABK). Rute yang dilalui adalah Okpo (Korsel), Selat Korea, Perairan Jepang, Laut Cina Timur, Selat Luzon, Laut Cina Selatan, Selat Apo,

Selat Cuyo, Laut Sulu, Selat Sibutu, Laut Sulawesi, Selat Makassar-Laut Jawa Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) hingga akhirnya merapat di Dermaga Koarmada II Surabaya.

Kapal selam KRI Ardadedali-404 merupakan kapal selam kedua dari tiga kapal selam yang dipesan





oleh Kementerian Pertahanan RI dan TNI AL kepada galangan kapal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Kapal selam pertama KRI Nagapasa-403 sebelumnya telah diterima TNI AL pada tahun lalu. Sedangkan kapal selam ketiga, saat ini masih dalam pembangunan di galangan PT PAL Indonesia, sebagai bagian dari kerjasama *Transfer of Technologi (ToT)* antara Indonesia dan Korea Selatan melalui *joint production* antara PT PAL Indonesia dan DSME.

Kasal menjelaskan bahwa pengadaan ketiga kapal selam tersebut dalam rangka peremajaan dan modernisasi Alutsista TNI AL yang merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang TNI AL. "Program – program peremajaan ini harus tetap berlangsung, tiap tahun harus ada pergantian Alutsista



dalam rangka penguatan postur Angkatan Laut", jelas Kasal.

Lebih lanjut Kasal menyampaikan terimakasih kepada pemerintah, karena melalui program modernisasi dan penambahan Alutsista terbaru maka tugas pokok TNI AL dalam menjaga kedaulatan di laut akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kepada jajaran TNI AL khususnya di Satuan Kapal Selam, Kasal berharap untuk melakukan pemeliharaan kapal tersebut dengan baik. "Usahakan kapal bisa terus dipelihara, sehingga setiap saat bisa dioperasikan", pesan Kasal.\*\*\*

# DELAPAN HELIKOPTER CANGGIH APACHE AH-64E RESMI PERKUAT TNI AD



Delapan Helikopter Serang AH-64E Apache yang memiliki teknologi tinggi dan tercanggih saat ini, secara resmi diserahterimakan dari Pemerintah Amerika kepada Pemerintah Indonesia. Keberadaan 8 (delapan) Helikopter Serang AH-64E Apache ini diharapkan dapat memperkuat TNI dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama di wilayah darat.

Hal tersebut diungkapkan Menhan RI Ryamizard Ryacudu dihadapan Kasad, Wakasal, Wakasau, anggota Komisi I DPR RI, Dubes AS di Indonesia dan Staf USAF, saat menerima 8 (delapan) Helikopter Serang AH-64E Apache di Apron Lanumad Ahmad Yani Semarang, Rabu (16/5). Penyerahan dilakukan Menhan kepada TNI yang

diwakili Aslog Panglima TNI Laksda TNI Bambang Nariyono. Dengan adanya heli itu berarti melengkapi Alutsista Skuadron 11/Serbu Semarang Puspenerbad.

Pengadaan heli Apache ini, lanjut Menhan, merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan juga guna memperkuat postur pertahanan negara. Selain itu pengadaan heli ini untuk mengantisipasi dimensi ancaman baik nyata maupun tidak nyata.

Pengadaan heli ini merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah AS melalui Program Management Office (PMO) dan menggunakan skema G to G sehingga pengiriman delapan heli ini dapat berjalan dengan lancar.

Kepada Personel TNI AD, Menhan berpesan untuk merawat dan menjaga pesawat ini agar masa pakainya dapat seoptimal mungkin. Dan ini juga bentuk terima kasih dan tanggungjawab pemerintah kepada rakyat Indonesia yang telah menghadiahkan Alutsista yang tercanggih saat ini.

Helikopter AH-64E Apache merupakan helikopter modern berteknologi canggih yang bisa dioperasikan dalam berbagai kondisi medan dan cuaca. Dengan teknologi canggih ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tempur serta profesionalisme personel penerbang TNI AD dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Menhan berharap kehadiran Helikopter AH-64E Apache dapat



memperkuat pelaksanaan tugas TNI AD, dimana pengadaan heli ini merupakan bagian dari program modernisasi Alutsista TNI sesuai Rencana Strategis Pertahanan Negara dan program Minimum Essential Force (MEF).

Sementara itu pemerintah AS melalui perwakilannya Erin Elizabeth McKee mengungkapkan rasa bangga dapat menjadi partner Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI. Pembelian heli Apache merupakan bentuk kemitraan strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat membuat kemitraan antara Indonesia dan AS semakin kuat.

"Kami berharap dengan tambahan Apache ini kepada Angkatan Bersenjata Indonesia dapat mendukung komitmen kedua negara untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," ujar Erin McKee.\*\*\*



## MENHAN : KAPAL KRI TELUK LADA 521 MENJADI KEBANGGAAN TNI AL



Dalam rangka untuk mewujudkan kekuatan pokok minimal atau Minimum Essential Force (MEF) dan membangun kekuatan TNI AL menuju World Class Navy, Menhan RI Ryamizard Ryacudu dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji selaku wakil pemerintah Indonesia beserta rombongan menyaksikan peluncuran kapal Angkut Tank (AT-4) di PT. Daya Radar Utama (DRU) Bandar Lampung, Kamis (28/6).

Menhan berharap keberadaan Kapal KRI Teluk Lada 521 ini dapat menjadi kebanggaan TNI AL khususnya serta TNI dan bangsa Indonesia pada umumnya. "Dengan hadirnya kapal tersebut diharapkan dapat dioperasionalkan secara optimal termasuk dalam mengatur sistem pemeliharaan dan perawatannya sebagai

pertanggungjawaban kita kepada rakyat Indonesia," ujar Menhan.

TNI AL biasanya mengambil nama dari teluk yang ada di Indonesia. Kapal LST tersebut diberikan nama KRI Teluk Lada 521, satu nama Teluk di Provinsi Banten yang menghadap ke arah gunung Krakatau.

Kapal AT-4 KRI Teluk Lada 521 memiliki spesifikasi panjang 117 meter dengan lebar 16,4 meter, dan tinggi 7,8 meter, dan dirancang untuk dapat mengangkut 15 Tank BMP 3F, 1 Hell Bell 412, 111 crew, serta mengangkut 360 pasukan.

Pada saat yang sama galangan DRU juga mengerjakan pesanan kapal tipe LCU-1500 milik TNI AD yang akan diserahkan pada akhir tahun 2018. Kapal tersebut

direncanakan untuk mampu mengangkut 8 Tank Leopard, 1 Tank Transportasi, dan 1 Helikopter, dengan panjang 99 meter, lebar 16 meter, serta kecepatan maksimal 14 knot.

Dari rencana 12 kapal LST baru tersebut, 3 kapal batch pertama telah dipesan (2 dikerjakan galangan DKB dan 1 di DRU), kemudian diikuti pesanan batch kedua sebanyak 3 LST pada April 2016 di galangan DRU dan diikuti dengan keel laying pada bulan Juni dan Juli 2018.

PT DRU telah mendukung program penguatan Alutsista, khususnya Armada Laut guna mendukung pertahanan maritim di Indonesia yang sudah menghasilkan banyak kapal dengan sebagian besar komponen dalam negeri.\*\*\*



Sumber: infopublik.id

## ANGKATAN UDARA PHILIPINA TERIMA DUA UNIT PESAWAT NC 212I DARI PT DI

Bertempat di Hangar Philipina, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menyaksikan penyerahan 2 (dua) unit pesawat NC212i dari PT Dirgantara Indonesia kepada Angkatan Udara Philipina, Selasa (26/6). Serah terima dilakukan Presdir PT Dirgantara Indonesia Elfien Goentoro kepada Departemen Pertahanan Philipina untuk selanjutnya diserahkan kepada pengguna akhir yaitu Angkatan Udara Philipina yang diwakili Kasau Philipina Ltgen Galileo Gerard R Kintanar JR AFP.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP RI) untuk Republik Filipina

merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau, HE Dr. Sinyo Harry Sarundajang turut pula hadir menyaksikan serah terima 2 (dua) unit pesawat NC212i Philippine Air Force.

Pesawat dengan kode registrasi AX-2119 dan AX-2120 berhasil melakukan *ferry flight* dari Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung menuju Clark Air Base, Mabalacat City, Philipina pada 8 Juni 2018 dan mendarat dengan selamat tanggal 14 Juni 2018. Rute yang ditempuh yaitu Husein Sastranegara, Bandung – Syamsudinnoor, Banjarmasin – Juwata, Tarakan –

Puerto Princesa, Philippina dan mengakhiri perjalanan di Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga, Philippina.

Dua unit pesawat NC212i ini merupakan Proyek Akuisisi Pesawat Terbang Angkut Ringan Bersayap Tetap di bawah Program Modernisasi Angkatan Bersenjata Republik Filipina. Kehadiran pesawat CN212i dalam jajaran Angkatan Udara Philipina diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan Angkatan Udara Philipina dalam mendukung sejumlah misi seperti pertahanan teritorial, keamanan dan stabilitas, bantuan kemanusiaan,



Sumber: twiter.com

penanggulangan bencana serta pertahanan dan keamanan internasional.

Presdir PT DI berharap dengan diserahkannya 2 (dua) unit pesawat CN212i ini, dapat memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Filipina dan memiliki peran penting untuk mendukung tugas operasi Angkatan Udara Filipina. Pada akhirnya dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Philipina melalui skema G2G yang solid.



Sumber: fauzankesuma.com



Sumber: mintfo.com

Pesawat CN212i ini adalah pesawat yang dimiliki Angkatan Udara Filipina dan sepenuhnya diproduksi oleh PTDI. Hingga saat ini PT DI telah memproduksi sebanyak 114 unit NC212i. PTDI adalah satu-satunya industri pesawat terbang di dunia yang memproduksi pesawat NC212i.\*\*\*





# WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## INFORMATION CONFLICT, NATIONAL SECURITY & STATE DEFENSE



THE REHABILITATION CENTRE  
OF INDONESIA MINISTRY OF  
DEFENSE AS A FACILITY  
TO ACHIEVE THE AUTONOMY  
AND PRODUCTIVITY OF  
DISABLE  
PERSONNEL OF INDONESIA  
MINDEF AND TNI

THE ROLE OF THE  
CONSTRUCTION CENTER  
OF THE DEFENSE  
FACILITIES AGENCY  
MINISTRY OF DEFENSE  
IN THE FRAMEWORK OF  
STRENGTHENING THE  
INDONESIAN NATIONAL  
DEFENSE THROUGH THE  
TNI INFRASTRUCTURE AND  
FACILITIES

RECALLING "SCIENCE AND ACT,  
GEEST-WIL-DAAD"





## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Air Vice Marshal Hadiyan Sumintaatmadja

### Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD  
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public  
Communication Center  
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Editors:

Pns M. Adi Wibowo, M.Si  
1<sup>st</sup> Lt. Lindu Baliyanto.

### Graphic Designer:

Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi

### Photo:

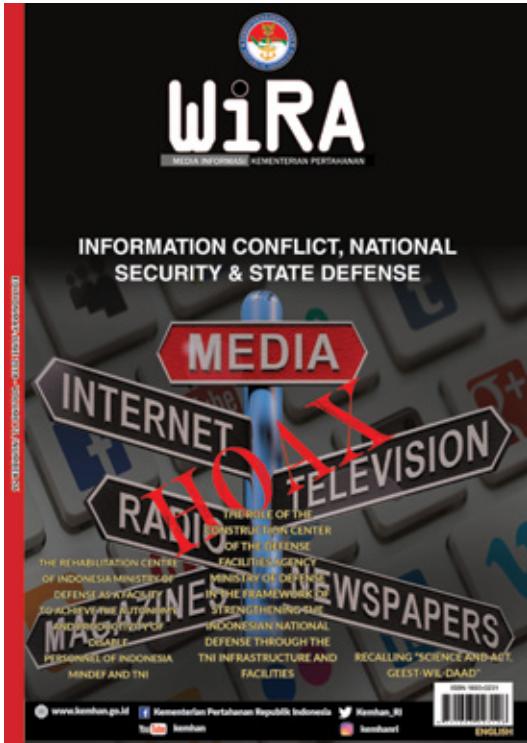
Photografers of Public Communication Center of  
MoD

### Distribution Staff:

Nadia Maretti,M.M.

### Published by:

Public Communication Center of MoD,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta  
Telp. 021-3829151



# ***Editorial***



Dear kind readers,

We warmly greet you through this third edition of WIRA of Mei-June 2018. It brings materials related to Information Conflict, National Security & State Defense; The Rehabilitation Centre of Indonesia Ministry of Defense as a Facility to Achieve the Autonomy and Productivity of Disable Personnel of Indonesia Mindef and TNI; The Role of the Construction Center of the Defense Facilities Agency Ministry of Defense in the Framework of Strengthening the Indonesian National Defense through the TNI Infrastructure and Facilities; Recalling "Science and Act, Geest-Wil-Daad" .

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA magazine can also be accessed online in [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).

# Contents

## ARTICLE

6

### INFORMATION CONFLICT, NATIONAL SECURITY & STATE DEFENSE

Social media plays a new role in politics, both on a national and international scale. The use of social media by digital activists has been widely used in several countries in the world such as Brazil, China, Germany, Poland, Russia, and Indonesia



14

### THE REHABILITATION CENTRE OF INDONESIA MINISTRY OF DEFENSE AS A FACILITY TO ACHIEVE THE AUTONOMY AND PRODUCTIVITY OF DISABLE PERSONNEL OF INDONESIA MINDEF AND TNI

Ministry of Defense Rehabilitation Centre (*Pusrehab Kemhan*) plays its role as a supporting element on the implementation of defense duties and functions. It performs some of the Ministry main tasks in the field of medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospitals.



18

### THE ROLE OF THE CONSTRUCTION CENTER OF THE DEFENSE FACILITIES AGENCY MINISTRY OF DEFENSE IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING THE INDONESIAN NATIONAL DEFENSE THROUGH THE TNI INFRASTRUCTURE AND FACILITIES

Every country has its own defense system to defend its territory whether it is land, sea or air. By using the defense system that the country has chosen, it is expected they can defend the territory and sovereignty of the country from incoming threats from either outside and inside of its own country.

24

### RECALLING "SCIENCE AND ACT, GEEST-WILDAAD"

Just recently, there was a busy virtual discussion about Pancasila Ideology Development Board (or as known as its abbreviation in Indonesian - BPIP). This board was newly established based on Presidential Regulation No. 7 of 2018.



## INFORMATION CONFLICT, NATIONAL SECURITY & STATE DEFENSE

By:

Dharma Agung, M.Si (Han)

Alumni of the University of Defense

Social media plays a new role in politics, both on a national and international scale. The use of social media by digital activists has been widely used in several countries in the world such as Brazil, China, Germany, Poland, Russia, and Indonesia. Social media originally used to voice the aspirations of society is now also used to conduct political protests, rebellions, and gave birth to a number of revolutions in various countries in the Middle East known as Arab Spring.

*"Whoever controls the media, controls the mind."*  
- Jim Morrison-

This paper will cover the social media role of information war/conflict, the phenomenon of "Truth Decay" in the Post-Truth political era, and alternative solutions in the digital literacy movement to strengthen national security from information or cyberspace.

**Social Media and War/Information Conflict**

Social media becomes a political tool because it is perceived as a cheap media channel, can reach a wider and targeted public, and without geographical boundary

barrier. The use of social media allows to communicate, share or capture information, analyze socio-political dynamics and anticipate the economic-financial trends, but also to describe events, model realities, influence perceptions of specific situations, specific problems or people, and influence choice and behavior.

Therefore, social media can greatly influence institutional decision-making, business or strategic teams, as well as the formation and development of collective awareness of public

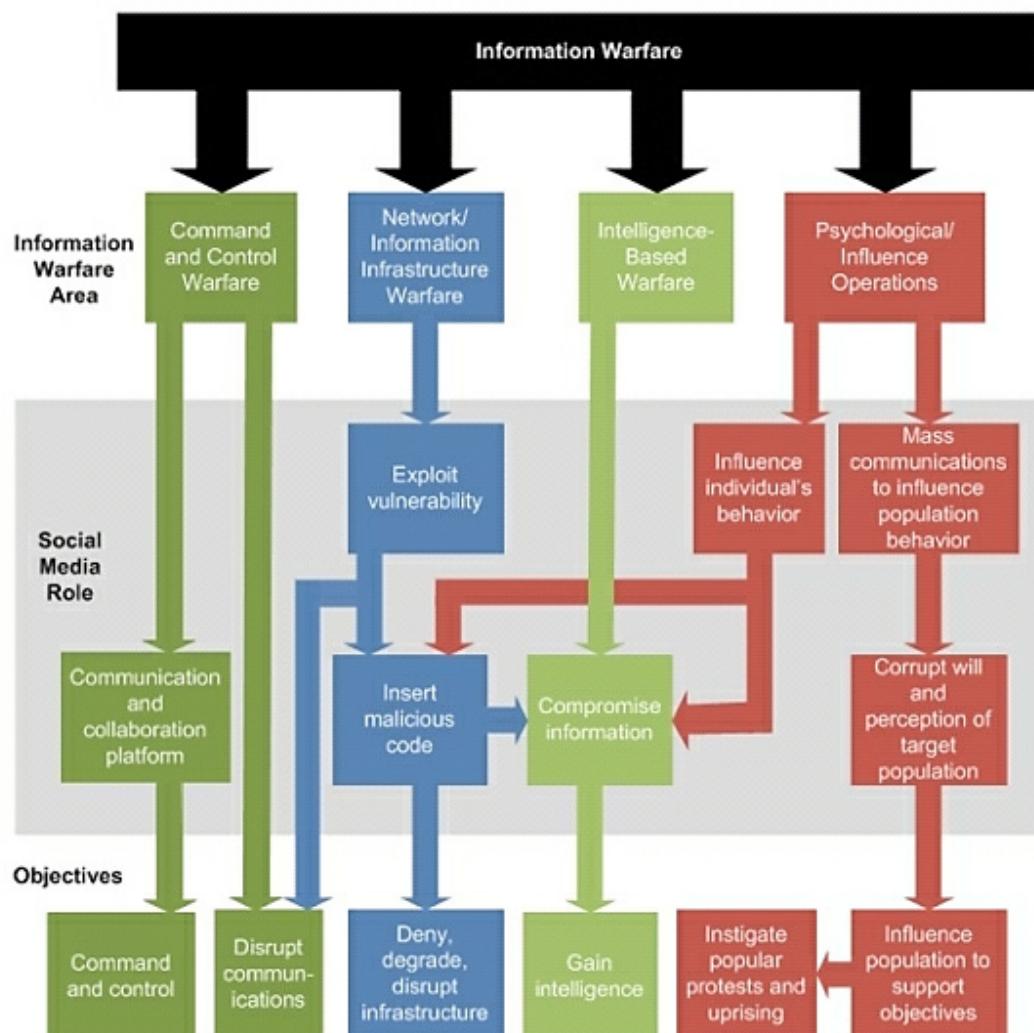
opinion. These tools can be used to interfere with the opponent's decision-making process, either directly, ie manipulating their information and analysis frameworks or affecting their close collaborators, and indirectly: influencing groups of people (ie political parties, unions, public opinion, etc.) whose reactions influence the choice of a country's leadership.

Aylin Manduric in his article "Social Media as a Tool for Information Warfare" mentions social media as a weapon of words

that affects the hearts and minds of targeted audiences, and weapons of mass destruction that could have an impact on targets in the physical world. Social media applications can be a tool for conflict when they fall into the wrong hands.

In the context of modern warfare, social media can also be used as a weapon in Cyber Warfare, Information Conflict/Warfare, Hybrid Warfare or Netwar. Niekerk and Maharaj show how social media play a role in information conflict, as shown in Figure 1.

Gambar 1. Social Media In An Information War



Source: Brett Van Niekerk, Manoj Maharaj, *Social Media and Information Conflict*, International Journal of Communication 7, 2013, hal. 1175

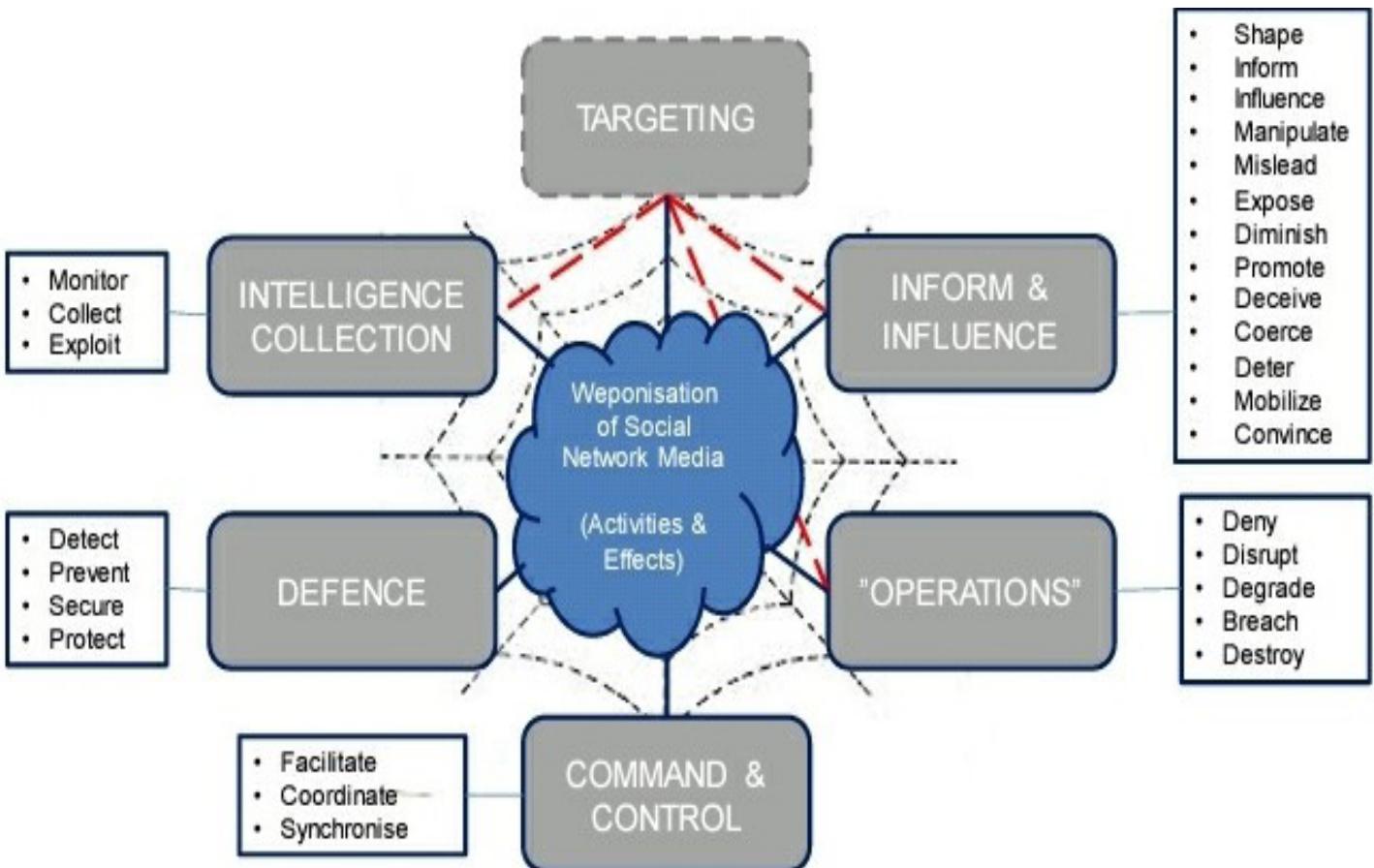
Thomas Elkjer Nissen proposes six ways social media can be used to support military operations, including Intelligence Collection, Targeting, Inform and Influence (Psychological Warfare), Cyber Operations, Defense, and Command and Control.

should not overestimate the role of social media in Arab Spring and similar events, as traditional media also play an important role. Similarly, the government's attempts to block access to the mitigation of the riots have varying degrees of success. Clearly, social media is not a major

the real world then it will not mean anything.

But social media is not entirely wrong, because social media is a tool. The public spotlight on social media's contribution to conflict and community polarization is due to

Gambar 2. Social Media As a Weapon



Sumber: Nato Strategic Communications Centre Of Excellence, *Social Media As A Tool Of Hybrid Warfare*, 2016, hal. 11.

It is not surprising that some countries regard social media as a threat to national security, including democracy, and blocking access to a number of social media services. Is it possible with these political events to conclude that social media poses a threat to the political order and national security?

Aday, Farrell, Lynch, Sides, and Freelon (2012) stated that they

factor, and the whole context is important. Riot and rebellion cannot be instigated through social media unless the political and social climate is conducive to such an event. Social media can be considered as a tool to support or facilitate information-based conflict, and may not be enough to create a social rebellion by itself. Its meaning, the power in social media, without the support of power in

an algorithm developed by a social media company deemed to have an echo chamber effect. This effect is a metaphorical effect, in which information, ideas, or beliefs are reinforced by communication and repetition within a defined system.

In the "echo chamber" effect, official sources are often unquestioned and different views compete for censorship,

prohibited, or under-represented. The result is the homogenization of information from what is perceived to be shared and represents one's sense of subjectivity, as well as the strengthening of information to the people in it. The "echo chamber" effect will greatly impact when the information is propagated by false information, hoaxes and the like.

### **Post-Truth Politics and Truth Decay**

Technology always has two sides. In the context of the development of digital information technology, the perception of threats to the use of social media is used as a tool of political propaganda.

Fahmi Ramadhiansyah states, researchers have used the term "computational propaganda" to explain the accumulation of social media platforms, autonomous agents, and large data assigned to the manipulation of public opinion. The propaganda of computing itself is the use of algorithms, automation, and human curation by deliberately spreading misleading information through social media networks.

Social media has turned into a platform where Post-Truth politics and computational propaganda overlap in the midst of algorithm technology, which changes politics for good. Utilization of irresponsible social media as a political tool will further strengthen divisions between political groups, and worse, enlarge narrow thinking among the public.

Samuel Woolley and Philip Howard, explained that social media is an important platform for political engagement and a crucial channel for disseminating news content.

Social media is also a primary medium where young people develop their political identity. In some countries this may be due to some form of information service such as Facebook, which effectively monopolizes social media platforms in public life.

In some democracies, the majority of voters use social media to share political news and information, especially during elections. Besides, only a small proportion of people in democratic countries have regular access to social media. Such platforms are still the basic infrastructure for political conversations between journalists, civil society leaders, and political elites.

Social media is actively used as a tool for the manipulation of public opinion, albeit with different ways and topics. In authoritarian countries, the social media platform is the primary tool for social control, especially applicable during political and security crises. On the other hand in democracies, social media is actively used for computational propaganda either through extensive efforts in the manipulation of opinions or experiments targeted at specific segments of society.

Social media play an important role in the circulation of ideas about public policy and politics. However, more and more social media platforms are leaning for manipulative disinformation campaigns. (Forelle et al., 2015; Woolley, 2016; Gallacher et al., 2017)

A non-profit organization from the United States, RAND, released a document entitled "Declining Trusts

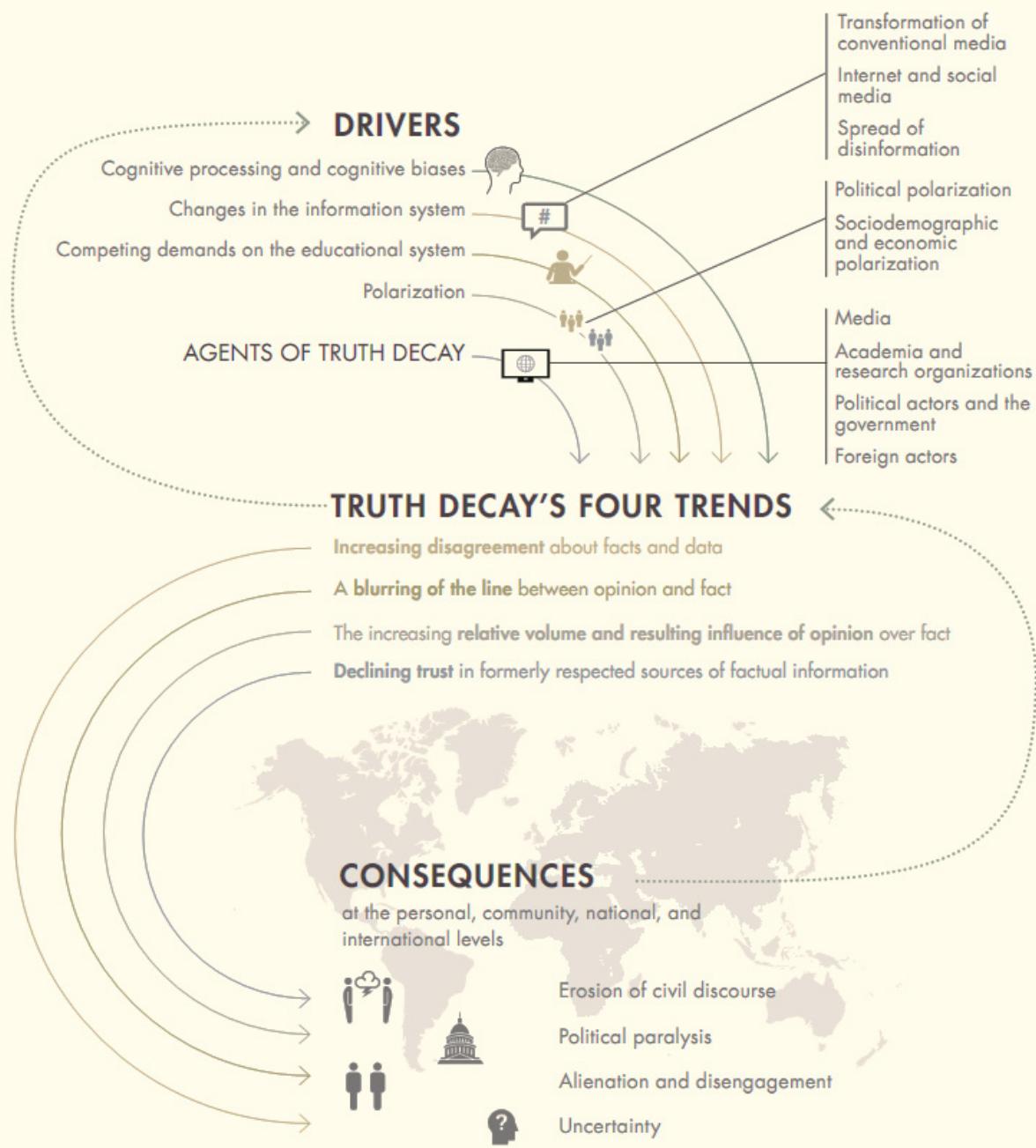
in Facts and Institutions Imposes Costs on Society" that studied the phenomenon of "Truth Decay" that became a phenomenon in US society. Truth Decay is described as a loss of fact and analysis in the public life of American society. It is characterized by trends: (1) increased disagreements about facts and analytical interpretations of facts and data; (2) the blurring of the line between opinion and fact; (3) increased volume and influence resulting from personal opinion and experience of facts; and, (4) decreased trust in the well-respected facts source.

The cause of Truth Decay is suspected because of the following factors: (1) cognitive bias; (2) the emergence of social media and other changes to the information environment; (3) demands on an educational system limited to its ability to follow changes in the information ecosystem; and, (4) the political, social and economic polarization of the people.

The effects of this "Decay of Truth" include: the erosion of civil discourse, political paralysis, alienation and non-attachment of individuals from political and social institutions, and policy uncertainty at the national level. Moreover, the "Decay of Truth" in political propaganda through false news, the amplified hoax through social media resulted in information bias. This trend has also been observed in Indonesia. The above conditions are also an indicator of "Post-Truth Politics" where politics no longer uses common sense and tends to put emotionality forward because of information bias as a result of political propaganda.

Picture3 Decomposition Of Truth As a system

**Figure S.1**  
**Truth Decay as a System**



Source: Jennifer Kavanagh, Michael D. Rich, Truth Decay, An Initial Exploration of the Diminishing Role of Facts and Analysis in American Public Life, RAND Corporation, 2018, page. xvii.

Dian Basuki writes, AC Grayling's philosopher warns of 'intellectual integrity corruption' due to Post-Truth praxis. The social media bubble, according to Grayling, is one of the key payloads in Post-Truth culture. It contains an

'i-bite' element in which opinions are stronger and drown evidence or facts. The Post-Truth phenomenon can be described in the phrase "My opinion is more precious than the facts." (Dian Basuki, Tempo Indonesiana, 2017)

No wonder, many professors and doctors believe in hoaxes. This was revealed in the coverage of various national mass media (Media Indonesia - 5 January 2017, Republika - 4 January 2017, and Tempo - 4 January 2017). This fact is

corroborated in a study conducted by Hilmar Farid, Director General of Culture of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud), which shows the tendency of victims of false news or SMS (short message) fraud even those who have high intellectual level.

Surveys conducted by MASTEL (Telecommunication Society, 2017) show that hoaxes are often accepted are related to Social Politics (Pilkada, Government) as much as 91.8%, followed by SARA issues as much as 88%. Hoax is disseminated through social media (92.4%), chat apps (62.8%), web sites (34.9%) and others, of which

40.6% of respondents stated the spread of hoax as a means of influencing public opinion.

According to Eko Sulistyo, Post-Truth phenomenon in Indonesia can be widespread for four reasons. First, advances in information technology are asymmetric to the adaptation capacity of government and society. Secondly, there is an endless political competition since the 2014 presidential election. Third, there is support from certain communities in the extreme ideology of anti Pancasila. Fourth, there is anxiety with the changes and improvements of the current government system. (Eko

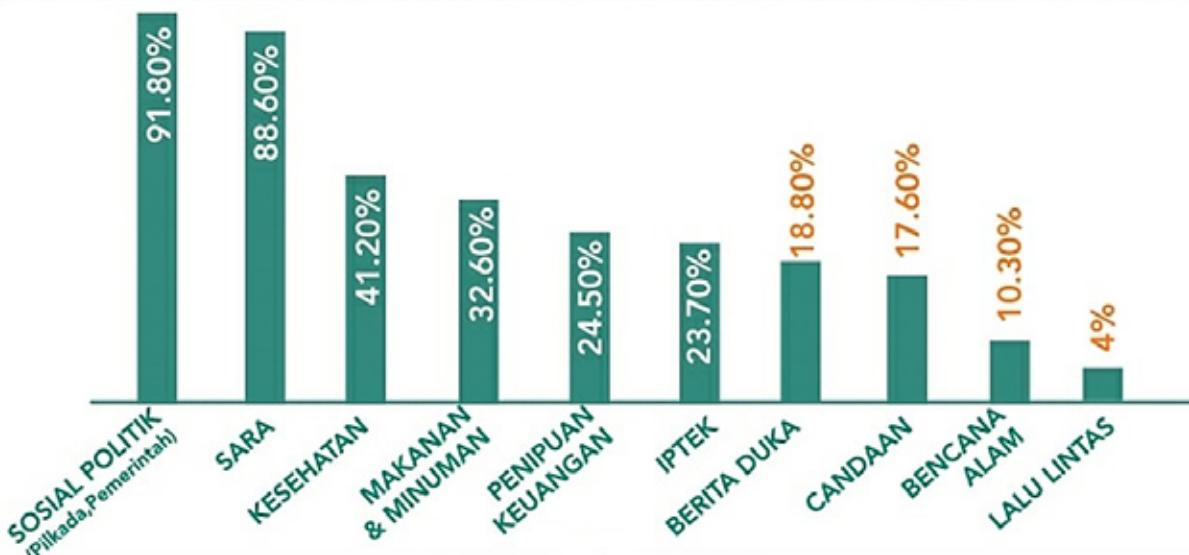
Sulistyo, Social Media and Post-Truth Phenomenon, Koran Sindo, November 28, 2017).

### General Elections and Threats of Political Conflict

The use of social media as a political tool is evident in the 2014 Presidential Election of Indonesia, the 2016 Presidential Election, and DKI Jakarta elections in 2012 & 2017. After the reformation, before the 2012 Jakarta Regional Head Election and 2014 Presidential Election, fragmented in such a way as it is today. Post-Presidential Election 2014, attacks on elected governments continue to emerge

Grafic1. Survey Result Of Indonesian Telematics Community

#### JENIS HOAX YANG SERING DITERIMA?



#### BENTUK & SALURAN HOAX

- BENTUK HOAX YANG PALING SERING DITERIMA



- SALURAN PENYEBARAN BERITA HOAX



#### PENANGGULANGAN HOAX

- ALASAN MARAKNYA PENYEBARAN HOAX MENURUT RESPONDEN



- CARA PALING EFektif UNTUK MENGHAMBAT PENYEBARAN HOAX



- TANGGUNG JAWAB PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAX



ource: Indonesia Telematics Community,Mastel Survey Result Abaout The National Hoax Epidemic of Jakarta, 13 Februari 2017.

and develop primarily through social media. The battle in the virtual world is often no longer put forward ethics, wise ways, or obedient to the rules. Fake news and hoax continue to mushroom in various social media networks, or instant messaging applications / chat and result in polarization in the community. The election of Governor (Pilgub) of DKI Jakarta 2017 by some considered as the peak of interlinear political conflict and penetrated into society, using various media and method.

2018 and 2019 will be Indonesia's political year considering that during this period there will be simultaneous elections, as well as the Presidential and Legislative Election. Reflecting from previous experience, then in the political year national security conditions can be vulnerable to the threat of conflict. Political propaganda by interest groups leading to information

conflicts can threaten order and harmony in society.

The Election Supervisory Board (Bawaslu) has released a map of potential conflicts in the 2018 elections. At least three areas have potential conflict due to identity politics. Specifically, Bawaslu also writes about the social aspects of media at the provincial, regency / municipal elections in 2018.

Of the 17 provinces that will hold elections in 2018, as many as 12 provinces (71%) of provinces that will hold elections, fall into the high category of social media usage levels in capturing pilkada-related issues. The level of social media use related to election issues, including among others related to the issue of identity politics is almost rampant in all regions with different degrees. A total of 38 districts (25%) were categorized as high levels of social media usage for pilkada issues at

the district / city level. While most are in the medium category as much as 63 regions (41%). Areas with moderate and high categories are among potential vulnerable to tension in social media related to election issues. The rest, only 53 (34%) of the regions are categorized as low rate of social media usage related to election issues. (National Election Supervisory Agency. (Emergency Election Index of Pilkada 2018, 2017, page 123.)

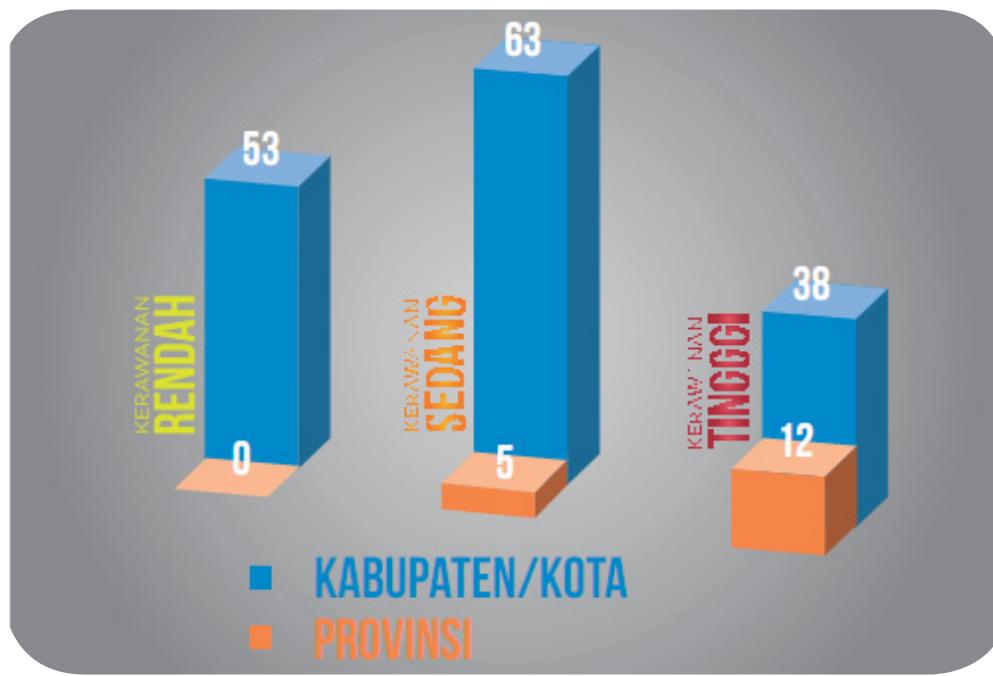
The use of social media can have a negative impact on national security and unfavorable consequences for the national interest. One of the indicators is the occurrence of polarization in society. Widespread political propaganda can divide society; create strongholds, factions, and intergroup sentiments. As for the state, it threatens the process of policymaking and democracy.

Media Kernel Indonesia several times makes observation and analysis of social network (social network analysis) to see polarization of society in cyberspace. Not infrequently, these observations are used to see the potential for real world chaos and real action correlations such as in the form of demonstrations / mass actions.

#### State Defense

The appeals of some parties to use social media wisely apparently are still difficult to be realized. The existing legal rules are not strictly enforced and

Grafikc2. The number of areas based on the level of vulnerability in aspects of social media use



ource: Indonesia Telematics Community,Mastel Survey Result About The National Hoax Epidemic of Jakarta, 13 Februari 2017

have not been able to prevent or minimize the negative use of social media. In the short term, law enforcement of criminals in cyberspace is a necessary step. But in the long run, of course this becomes ineffective when society is still low understanding of the digital world.

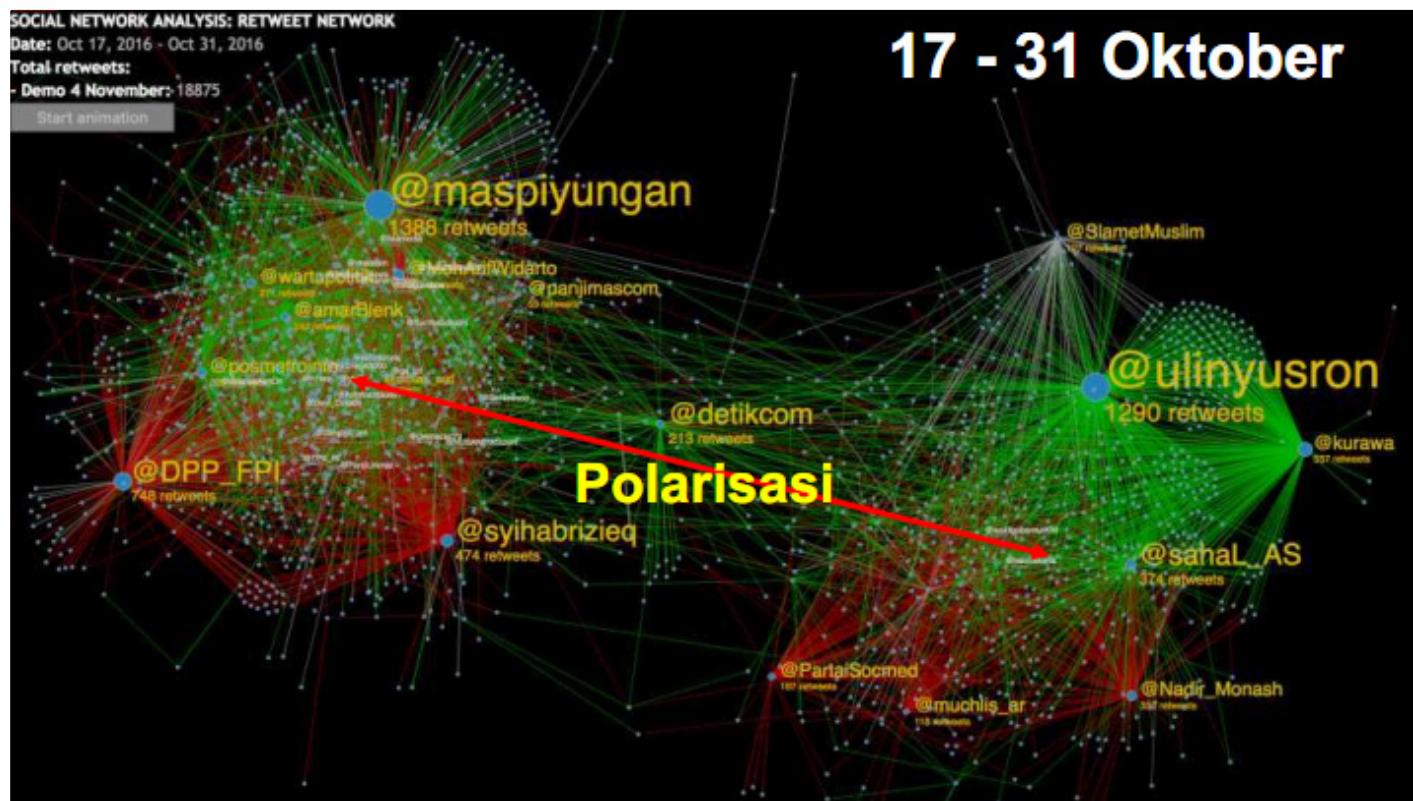
Colonel Todd Stratton, the Director of Air Forces Cyber Forward stated the key to superiority or dominance in cyberspace lies in people/human resources. For that we need the training of critical thinking. So, to ward off information warfare in the virtual world from fake news, hoaxes and the like, it takes not only the mastery and understanding of information technology. However, this requires digital literacy that includes an understanding of the rules, ethics, including identifying whether or not a valid information.

Thus, it is expected to arise public awareness and sensitivity to the emergence of an information/news that pitted the sheep and potentially create divisions in the community.

The obligation to educate the public regarding the use of social media is actually the responsibility of many parties. Not just family, school, or environment. In the community both in real life and in cyberspace, there have been many activities to support digital literacy, and to form communities to ward off hoaxes or counterfeit news. Nevertheless, the work is certainly tiring in the middle of the lack of interest in reading a society that prefers sentiment and egocentrism. Facts and data no longer have an objective value but are supposed to corroborate opposing group opinions and discredit other groups.

The Ministry of Defense (Kemhan) as the Institution/Ministry that initiates the State Defense activities can take this role by incorporating a curriculum on digital literacy. Thus, this method can be a long-term alternative solution for digital literacy to create a generation that loves homeland, country and nation through the use of information and social media appropriately. Moreover, it is associated with the context of modern warfare or new war, known through various terms such as hybrid warfare, cyber warfare, information warfare, net war, and so forth, then the ability to sort and process information is absolutely necessary especially for millennial generation.\*\*\*

Picture4. Polarization in Cyberspace



# THE REHABILITATION CENTRE OF INDONESIA MINISTRY OF DEFENSE AS A FACILITY TO ACHIEVE THE AUTONOMY AND PRODUCTIVITY OF DISABLE PERSONNEL OF INDONESIA MINDEF AND TNI

By:

Erlin Sudarwati,SKM, MM

Head of Sub Division of Vocational Rehabilitation of Mindef Center of Rehabilitation



## Introduction

**M**inistry of Defense Rehabilitation Centre (Pusrehab Kemhan) plays its role as a supporting element on the implementation of defense duties and functions. It performs some of the Ministry main tasks in the field of medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospitals. The task is carried out in the form of Integrated Rehabilitation for the Disabled

Personnel of Indonesia MINDEF and TNI.

The Integrated Rehabilitation is an activity which conducted integrally either in internal or external Centre. It is aims to restore and develop physical skills, competency, cultivate the spirit / motivation, minimize the dependency on others, grow the confidence, and can carry out social functions in the community life according to their ability, feel

accepted and appreciated as an independent and productive person.

## Disabled Persons

The terminology of Disabled Person, formerly known as Persons with Disabilities. However, the latest developments, National Commission for Human Rights and Ministry of Social Affairs view that the term "Persons with Disabilities" in Indonesian perspective connotes

negative meaning and is not in line with the main principles of human rights as well as against the noble values of the nation that upholds human dignity. It is therefore agreed that the term People with Disabilities is replaced by the term "Disabled Persons". This has also been supported by the issuance of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities.

Many people are confused with the terms of Defect, Disabled, and Disability. Even so far more familiar people use the term people with disabilities. At a glance these three terms have the same meaning but will be accepted psychologically different for their bearers when mingling in the social environment, where the label pinned to them will create the discrimination and inequality. In the official Indonesian Language Dictionary, Defect refers to goods or inanimate objects, or in other words rejected. Surely

there is no human being created by God with the condition. The term Disabled contains values that tend to form a negative meaning. Persons with disabilities are regarded as a group of helpless, unskilled and disabled persons for being 'blameworthy' or disabled.

Difabel is an acronym of Different Ability, or Different Ability People, people with different abilities. This term is used to refer to individuals with physical abnormalities. While the term of Disability is an approach to get a neutral term and does not save the potential for discrimination and stigmatization. The definition provided by the International Classification of Functioning for Disability and Health, which was then agreed upon by the World Health Assembly and used by The World Health Organization (WHO), "Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or

participation restrictions" (Disability is an "umbrella" terminology for disruption, activity limitations or participation restrictions).

According to the Law No. 8 of 2016, the definition of Disabled Person is any person with long-term physical, intellectual, mental, and / or sensory limitations which in interacting with the environment may experience barriers and difficulties to participate fully and effectively with other citizens based on equality of rights.

Meanwhile, the Disabled Personnel of Kemhan and TNI are the soldiers including students and Civil Servants of Kemhan, TNI Headquarters, and Personnel who suffered physical, intellectual, mental and / or sensory limitations in the long term, caused by performing official duties or not because a service which, therefore, may be an obstacle or obstacle





for him to engage in appropriate activities.

Disabled Personnel of Kemhan and TNI are mostly TNI soldiers in terms of duties as a soldier whose patriotic level has been tested. In general, the soldiers become disabled due to the duty or service of the soldier, to maintain the territorial integrity of the Unitary Republic of Indonesia or to secure the territory and other tasks related to the duty of the soldier service. Disabled Personnel of Kemhan and TNI should be respected as state servants, therefore it is well understood that countries and nations reward them through concrete and clear efforts that are beneficial for themselves as disabled personnel and their families.

Psychologically, the Disabled Personnel of Kemhan and TNI might become less confident because of the original body posture healthy and strong, because the risk in carrying out its duties leads to disability, physical function is not as it used to be. However, people with disabilities do not want to be pitied, but need to be given the opportunity and facilitated so that the existing deficiencies can still provide pride for the family and can be contributed to build the nation.

### Rehabilitation Centre

Rehabilitation is one of the means and efforts of the government to achieve the independence and welfare of disabled persons. Those efforts are implemented at the rehabilitation facilities organized by the government and / or the community. The rehabilitation facility is in the form of Rehabilitation Center which organizes one roof rehabilitation in the form of medical rehabilitation, education, training, and social.

Rehabilitation Centers are implemented not only in Indonesia, but also in almost all countries, there are rehabilitation facilities for Disabled Persons. According to WHO (World Health Organization), the number of disabled persons in a country is 10% of the total population. Therefore, a rehabilitation facility is needed in the form of Rehabilitation Center, which is expected to create independence and welfare of disabled persons.

In Indonesia, rehabilitation centres are not only organized by the government. The non-governmental organizations and communities are also contributed to assist the independence of

disabled person. Rehabilitation Center for Disabled Personnel of Kemhan and TNI, Pusrehab Kemhan, is organized under the Ministry of Defense, namely Pusrehab Kemhan.

As one of the government agencies whose main duty is to rehabilitate Disabled Personnel of Kemhan and TNI, Pusrehab Kemhan organizes "Integrated Rehabilitation" which is a series of rehabilitation activities covering medical rehabilitation services, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospitalization services for Disabled Personnel of Kemhan and TNI. It is internally and externally implemented in an integrated manner in Pusrehab Kemhan and in Kotama / regional units.

### Integrated Rehabilitation at the Indonesia Mindef Rehabilitation Centre (Pusrehab Kemhan)

Integrated Rehabilitation for Disabled Personnel of Kemhan and TNI is an effort to restore and develop physical performance, skills, cultivate spirit / motivation, minimize the dependency on others, grow confidence and can carry out social functions in community life according to ability, so they can be accepted and valued as a person who has the ability (independent and productive).

Medical Rehabilitation is a health service to physical disorder and function caused by condition / condition of disease or injury through the mixture of medical intervention, physical and rehabilitative to achieve optimal functional ability. Medical Rehabilitation Services at Pusrehab Kemhan consists of Public Health

Service (covering preventive and promotive health, including physical fitness of Disabled Person) and Special Health Services (including rehabilitative health, physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, providing the supporting device/ orthoses and the enactment of body replacement device / protease).

Vocational rehabilitation is an effort to provide various skills, science and technology towards the restoring the ability of the disabled personnel to work optimally according to their physical ability. Vocational Rehabilitation Services at Pusrehab Kemhan include 15 major skills such as Auto-mobile mechanics, Electrical Engineering, Computer Engineering, Computer Operators, Electronics, Welding, Tailoring, Graphic Design, Photography, Music, Carpentry, Integrated Farming, Catering, and Massage.

Social Rehabilitation is an effort

to restore the psychic and social skills of disabled person in order to restore confidence and able to carry out social functions in the life of the community. Social Rehabilitation Services at Pusrehab Kemhan consist of Social Psychology Guidance, Home Visit, Advanced Guidance, as well as Sports and Art Guidance.

Hospital Service is an integrated medical service, medical support, and medical rehabilitation, as well as research and development with the specificity of comprehensive medical rehabilitation in accordance with the provisions of the legislation. Dr. Suyoto Hospital Pusrehab Kemhan provides health services for the participants of Integrated Rehabilitation. It is oriented to the patient's safety based on the standards of the applicable of the Hospital Accreditation Committee. The Hospitals services of Pusrehab Kemhan is designed for Disabled Personnel of Kemhan and TNI such as Promotive, Preventive, Curative

and Rehabilitative Health Services.

In accordance with Pusrehab Kemhan's vision of "Achieving Independent and Productive Disable Personnel of Kemhan and TNI ", Pusrehab Kemhan strives to provide Professional Integrated Rehabilitation services. Thus, the mission of Pusrehab Kemhan is to improve the quality of Medical Rehabilitation services, Vocational Rehabilitation, Social Rehabilitation, Hospital Service and adequate administrative support.

Until now Pusrehab Kemhan is the only Rehabilitation Center that provides services to disabled Personnel of Kemhan and TNI from all over Indonesia. Therefore, Pusrehab Kemhan strives to become a professional Rehabilitator in order to create an independent and productive Disabled Personnel as well as to improve their welfare.\*\*\*



# THE ROLE OF THE CONSTRUCTION CENTER OF THE DEFENSE FACILITIES AGENCY MINISTRY OF DEFENSE IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING THE INDONESIAN NATIONAL DEFENSE THROUGH THE TNI INFRASTRUCTURE AND FACILITIES

By:

MUHAMMAD FERRY MUHROM, S.T., M.Si

(Alumni of Strategic and Global School University of Indonesia)



## Preliminary

Every country has its own defense system to defend its territory whether it is land, sea or air. By using the defense system that the country has chosen, it is expected they can defend the territory and sovereignty of the country from incoming threats from either outside and inside of its own country. In order to maintain the territory of the state and sovereignty, it is necessary to create development in the field of defense, such as the construction

of infrastructure facilities and infrastructure of the construction sector.

The national defense of a country is an attempt to defend the national sovereignty of the state, namely its territorial and sovereignty over other countries. In order to maintain its territory, the state security factor and the nation then becomes the determining factor of the State Defense from threats, challenges, obstacles and disruptions to the integrity of the nation and state.

According to Law No. 3 of 2002 on State Defense, Article 1 Paragraph (1) states, the defense of the state is all efforts to defend the sovereignty of the state, the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the safety of the whole nation from the threats and disturbances against the integrity of the nation and the State. While in paragraph (5) puts the Indonesian National Defense Forces (TNI) as the main component in the state defense system in maintaining the territorial integrity of the Republic

of Indonesia for the safety of all nations and countries from the threats, challenges, obstacles and disruption to the territorial integrity of the Republic of Indonesia either military or non military as well as coming from outside or inside of its own country.

A strong military defense in terms of quality and quantity is part of the sovereignty of a State. The defense system in peacetime is not to launch an open attack, but to defend the territorial sovereignty of the State, which is geographically encompassing land, sea and air, and protecting every citizen. In a peaceful state, military power can be a deterrent factor for other countries. Good quality and quantity of military defense should be supported by adequate defense facilities and infrastructures as a means of supporting state defense in the framework of national interests of a nation.

The Indonesian Defense White Paper 2015 states that the State Defense serves to realize and defend the entire territory of the Unitary Republic of Indonesia as a unit of defense, capable of protecting the sovereignty of the state, territorial integrity, and the safety of the entire nation from any threat, whether from outside or coming from within the country. The effort to realize and defend the entire territory of the Unitary Republic of Indonesia as a single unit of defense is held in the function of deterrence, repression and recovery.

The strength of defense is essentially a military force, consisting of human resources (soldier), material, facilities and military health which in its management is better than the management of potential defense, as the entity of the state defense tool needs continuous handling

in order to always be ready when needed by state, readiness is a key element of the military, discipline, skills and courage (braveness) which would require practice and support facilities and adequate infrastructure (Supriyatno 2014: 107).

### **The Role of the Construction Center the Defense Facilities Agency**

Based on Permenhan Number 58 of 2014, the Defense Facilities Agency (Baranahan) which is an element supporting function and duties of the Ministry of Defense who is responsible to the Minister of Defense and has the task of carrying out defense facilities management within Kemhan and TNI. The implementation of the functions and duties of the Defense Force Body to organize the preparation of technical policies, plans and management in



the field of defense facilities of the TNI includes the procurement of construction services and defense facilities and certification of the feasibility of TNI defense facilities and infrastructure.

The role of the Construction Center (Puskon) of the Defense Facilities Agency in meeting the needs of facilities and infrastructure of Defense in the field of construction building shall be regulated within the Minister of Defense Regulation No. 58 year 2014 article 1023 that the Construction Center of the Defense Facilities Agency acts as construction planner, construction controlling and supervision of defense construction.

As a comparison of the role of the state defense instrument organization, the United States of America has the Engineer Corps, namely The United States Army

Corps of Engineers (Usace) which has ± 650 military personnel, 34,600 civil servants, scientists, personnel with special expertise and work in a unified field engineering and environmental handling (Yuhandana, 2008: 1). The scope of work of the USA Engineer Corps includes:

1. Detail Engineering Design (DED), construction of water resources construction and operation as well as other civil projects such as flood disasters, anticipation and protection of the environment, navigation and responsiveness to the handling of natural disasters.
2. Detail Engineering Design (DED) and construction management which is a military facility of the Army (AD) and Air Force (AU).
3. Supply Detail Engineering Design (DED) and construction management in support of defense and Federal agencies (Interagency and International Services).
4. Carry out engineering functions in order to provide services to the public and the general public in accordance with the rules established by the United States government (Yuhandana, 2008: 2).

The Construction Center of the Defense Facilities Agency in its role as a building construction planner, controlling the construction of buildings and supervision of defense military buildings related to defense within the TNI that are strategic based on priority scale such as the construction of bases, territorial borders of





state territory, improvement of services such as hospitals in the Ministry Defense and within the TNI as well as the construction/renovation of educational facilities in each Regional Command based on the prevailing provisions both technically and administratively as well as the construction of official houses for members of Kemhan and TNI in order to provide welfare for personnel within the Ministry of Defense and TNI.

### **Development of Defense Infrastructure and Facilities in Border Regions**

According to Makmur Supriyatno (2014) in his book about the Defense Science stated that the State Defense is the main task of the state implemented by the government from time to time in an effort to defend the sovereignty of the state, the unity

of the territory of the unitary state of the republic of Indonesia and the safety of the whole nation from the threat and disruption to wholeness nation and state. Based on Law No. 3 of 2002 on State Defense and Presidential Regulation No. 97 of 2015 on General Public Defense Policy, the Ministry of Defense has a vision and mission in a sovereign and independent state defense system. Strength of defense organized by the government to ensure the integrity of the region by way of national development in the context of achieving the objectives in its implementation in a sustainable, environmentally sound and national resilience based on the insights of the archipelago.

The defense of a country is developed in order to realize a universal defense system. The capabilities of the defense system are structured on the basis of state

defense strategies to reflect the capabilities of defense forces and national resources. The defense strategy of the state was developed in order to achieve a goal that is the deterrence of the State's defense capability to overcome the threat to the sovereignty of the Unitary Republic of Indonesia and the safety of the entire Indonesian nation. Especially with the border area of a country can not be separated from the threat aspect to the sovereignty of a country, with the threat in the border area it must be done prevention.

In relation to these facilities and infrastructure (Sarpras) Defense of the TNI in the Field of Construction concerning the territorial border area of the country is positioned into a strategic potential. This potential is felt in all aspects of the life of a nation and nation. In addition to the aspects of foreign politics and



detikcom

aspects of state defense in the border areas between the borders of the region, both are in positive and negative ways.

The Ministry of Defense is a government institution responsible for the preparation of defense strategies in the achievement of national goals set in accordance with the 1945 Constitution. In article 30 paragraph (3) states that the Indonesian Armed Forces consists of Army, Navy and Air Force as a state instrument in charge of defending, protecting, and maintaining the integrity and sovereignty of the state.

According to Makmur Supriyatno in his book Defense and the International Land Border, to meet the requirements as a country must establish and determine the inter-state land border, namely territorial

or territory and its inhabitants, with the outer boundaries of its territory. These borders reflect the limits of the powers and rights of a country or its sovereignty over its territorial and its citizens.

In this regard, Kemhan in this case the Construction Center of the Defense Facilities Agency carries out the construction of facilities and infrastructure "security belt". Infrastructure Development, which is a Strategic Plan is the construction of Path (Inspection and Border Patrol) along the border connecting between Border Security Post (Pamtas) with the construction of a connecting road between the post with the settlement in Kalimantan. JIPP is also one of the Strategies of the Ministry of Defense in maintaining the border territory of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) with Malaysia.

Defense strategy is a way to achieve a goal that initially focused only on military means in the war to win a battle. However with the development of the times and technology, the scope of defense strategy becomes increasingly complex. The subject of war is no longer measured by win or defeat in battle, but who can quickly summon reinforcements so as to strike again.

With the construction of JIPP, it is expected to answer the challenges of defense strategy and provide strengthening of the National Security of Indonesia, which is part of the Panca Gatra Defense and National Security and in order to improve the economy in the Border region. JIPP coupled with the increase of security factor in border area by placing the Army soldiers, hence expected to improve economy of local people.

All efforts to be done will have an impact to strengthen the sense of unity of local communities.

## The Challenges and Hope of Construction Center in the Future

In this globalization era, not only free goods are traded into Indonesia, but also in the field of services such as architectural design services and other services. Therefore, Indonesia should not remain silent in the face of this increasingly globalization process. Globalization also affects the organization of Construction Center, which is challenged to develop its organization.

In the meantime, the fulfillment of the need for defense facilities

such as construction of bases, the construction of hospitals, the construction of official houses and other forms are the responsibility of the Construction Center of the Defense Facilities Agency. However, with the support of Human Resource Defense (Civil and Military) with a quality that is ready to compete with other countries and according to their respective field qualifications then the Construction Center of the Defense Facilities Agency can handle not only military construction projects. In addition, the Construction Center of the Defense Facilities Agency also has the potential to work on other civil projects, such as construction works, consultant planners and supervisory consultants at both national and international levels.

In the future it also demands the role of the Construction Center of the Defense Facilities Agency to develop the Organization in order to achieve the goals of the pro organization to the national interest.

The Defense Facilities and Infrastructure TNI construction is one of the most important things in strengthening the defense of the Republic of Indonesia in the framework of the National Nations interests in order to support the National Resilience of Indonesia. TNI as the main component in the state defense system should be supported by adequate construction facilities and infrastructures.\*\*\*





Source: bhataramedia.com

## RECALLING “SCIENCE AND ACT, GEEST-WIL-DAAD”

By:

Prisca Delima, M.Sn., M.Si (Han)

Social environment and culture observer

Just recently, there was a busy virtual discussion about Pancasila Ideology Development Board (or as known as its abbreviation in Indonesian - BPIP). This board was newly established based on Presidential Regulation No. 7 of 2018. However, the netizen gossip was more on the salary of its officials, not highlighting its task, or about why this body should exist or need to be existed. Such gossip may also in-line with the discussion of holiday allowance, a gossip that happens repetitively every year before the led holiday.

Without any wish to participate in the salary scale polemic et cetera, BPIP is interesting to note.

Its tasks seem to be so complex, yet distinctively follow the style of language in legal terminology that is fond to use such a long sentence that will not be completely finished to read in one breath. On its website, it is stated that "BPIP has the duty of assisting the President in formulating the direction of Pancasila ideology development policy, coordinating, synchronizing and controlling the development of Pancasila ideology as a whole and continuously, and conducting the standardization of education and training, providing education and training, and providing recommendations based on review of policies or regulations that contradict with Pancasila to the state

high level institutions, ministries/institutions, local government, socio-political organizations and other components of society." In the instant communication culture that is commonly familiar with our public nowadays, such a long sentence is difficult to be digested, let alone to be understood. One thing is certain; such sentence cannot fit into one twit in a certain popular social media platform. It is something that certainly invites protests from the Gen-Z citizens.

**The question is: should that agency be made?**

That question often arises in netizens' communication,

specifically the Gen-Z group who might have some distance with Pancasila. This particular group may also not be able to remember the five basic principles of the country, let alone the details of the guidance in Pancasila practices that once has been so attached to the mind of the educated citizen during the era of P4 socialization. P4 refers to Indonesian abbreviation of Guidance on the Practices and the Applications of Pancasila, for those who wonder what P4 is. That P4 socialization was once so "lovable" as it is required in every levels of education, to be a scourge, as well as to be avoided as it is considered so boring based on its "lullabies" style of communication that makes people so sleepy all the time of compulsory socialization. Nevertheless, it cannot be denied that P4 was a successful form of socialization of national character building during the New Order

era, yet has become vanished and swallowed to the earth during the Reform era.

Discussing Pancasila ideology cannot be separated from the first president of the Republic of Indonesia. His Excellency Dr. Ir. Soekarno, so he was later being called after appointed as doctor honoris causa in law by the Senate of Gadjah Mada State University on 19 September 1951. The title of doctor honoris causa is certainly given not without deep consideration. Although Soekarno was not a scientist in the field of law, the recognition is given for laying the foundations of Indonesia state philosophy.

Soekarno refused to be called as the creator of Pancasila, let alone the inventor or Pancasila analytical theorist. Because indeed he is not. In Soekarno's assumption, Pancasila

is a sense that has already exists and has always been contained in the soul of Indonesia as a nation. By receiving the honorary title, he has a particular wish for Pancasila that is "for the life and fertility of science". It was what he want to be appreciated in his speech "Science and Acts, Geest-Wil-Daad" during his inauguration as Doctor Honoris Causa.

Soekarno emphasized that science would only be valuable if it was used to serve for the welfare of human life, nation life, and humanity. For that reason, science needs to be linked with acts, knowledge with deeds, so "knowledge is for good deeds, and good deeds should be led by knowledge." This is certainly in contrary with the quick reflex of "copy-paste-distribute" of social media era nowadays that dominated by media illiteracy groups.



Source: politictoday.com



Literally speaking, Geest-Wil-Daad can be translated as Spirit-Willingness-Action. Geest-Wil-Daad is a sequence of events that in Soekarno's opinion underlies everything. Geest - the spirit that arises due to the acquired knowledge and understanding. That acquired knowledge and understanding then trigger Wil - the willingness to act. And that willingness to act then triggers the occurrence of Daad - the actions. Geest-Wil-Daad is a series of three intertwined things, since good planned actions cannot be realized without willingness to act or do good deeds that triggered certainly by a good understanding.

In this regard, Soekarno wants the transformation of life of the nation towards a more advanced direction, by giving priority to collective willingness to act that is driven by collective spirit to realize

collective actions. Such trilogy is often echoed as *nationale geest-nationale wil-nationale daad*. Common spirit, willingness, and action of a nation to realize its national goals.

By establishing BPIP, President Joko Widodo has performed his duty as a political leader. As a leader, he seeks the ways to invite the community he leads to better practice Pancasila. Initial efforts to mobilize the nation to know more closely and want to implement the values within Pancasila.

Is that enough? Soekarno reminded in his speech "without any individual willingness, there will be no national willingness; without any national willingness, there will be no national action." For that matter, it is important that there is capacity and ability of the leader to activate the national actions

to practice Pancasila. Can BPIP encourage the implementation of Pancasila radically?

#### **Yes, Radically.**

Why it should be radically? This paper is also an invitation to restore the meaning of the "radical" word to its original description. In Kamus Besar Bahasa Indonesia, "radical" is positively correlated; in terms of its fundamental nature that demand change, and more importantly, it demand progress in thinking or acting. In the current crisis in Indonesia, with so many counter-events with Pancasila ideology, radical action is needed to overcome it. Actual action is seen as the embodiment of Pancasila practice.

The struggle of BPIP, as well as the Bela Negara activists, is how to make Pancasila not only a

series of words to be read during ceremonies, written on the walls, but rather as actions, as deeds. This is the effort of Pancasila sustainable development in order to keep it as up-to-date and to be aimed to achieve community welfare.

Pancasila sustainable development effort in its practice is the endeavor to determine the worth and values of Pancasila in real life, as well as the real strength as well as the real sense of Indonesian people who practice Pancasila in their environment. A great responsibility has been given to BPIP to reincorporate Geest-Wil-Daad back to the whole aspects of life of Indonesian people, moreover "to market it a modern way" to Gen-Z as the largest population component in Indonesia and to make it real in the daily practice of Indonesian nation.

Pancasila, as a hereditary treasure should be given a new

packaging with a massive marketing effort. It can also be regarded as creating Attention-Interest-Desire-Action of Pancasila. The Attention-Interest-Desire-Action Approach of Pancasila undertaking by BPIP is still unclear to date. Though it can help Bela State activists in communicating Pancasila related materials to their audiences. Inevitably, the act of dissemination of Pancasila should be coercive and using indoctrination way since Pancasila has been established as the basis of the state or as the underlying structure.

By making BPIP an official institution under the executive authority, President Joko Widodo wants BPIP to play an active role in soft power approach to tackle many terrorism incidents that have been surfaced recently. By providing understanding of Pancasila as the basis of the state and as the underlying structure, it is hoped that actions that reject

the state ideology may disappear. This is important, because if Pancasila as the foundation of the state is destroyed, certainly the Unitary State of the Republic of Indonesia will also be destroyed as its consequences. Pancasila as the soul of the nation is believed to have cultured in the life of Indonesian society. Even though in the course of his journey, there are a number of ripples that keep trying to destabilize Pancasila.

At the end of his speech as Doctor Honoris Causa, Sukarno declared, "by going to the sea, the river is faithful to the source", with the understanding of Pancasila, it will arise our willingness to put it as our actions. Geest-Wil-Daad. Pancasila will not be magical nor miraculous without Indonesian people who practice its values on a sustainable basis. Geest-Wil-Daad Pancasila should be happen on an ongoing basis.\*\*\*



source: twiter.com

